



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN KELOMPOK KAUS MERAH DALAM  
MENJATUHKAN REZIM ABHISIT VEJAJIVA  
DI THAILAND (2008-2011)**

**SKRIPSI**

**NOVANDRI ALEXANDER  
0606054935**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN KELOMPOK KAUS MERAH DALAM  
MENJATUHKAN REZIM ABHISIT VEJAJIVA  
DI THAILAND (2008-2011)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**NOVANDRI ALEXANDER  
0606054935**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
DEPOK  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Novandri Alexander

NPM : 0606054935

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini diajukan oleh :**

Nama : Novandri Alexander

NPM : 0606054935

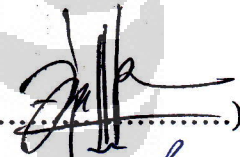
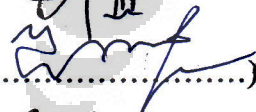
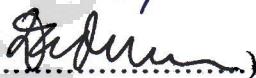
Jurusan : Perbandingan Politik

Judul Skripsi :

**PERAN KELOMPOK KAUS MERAH DALAM MENJATUHKAN  
REZIM ABHISIT DI THAILAND (2008-2011)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Perbandingan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Hurriyah, S.Sos., IMAS	(.....  )
Penguji Ahli	: Cecep Hidayat, S.IP., IMRI	(.....  )
Ketua Sidang	: Donni Edwin, S.Sos., M.Sc	(.....  )
Sekretaris Sidang	: Ikhsan Darmawan, S.Sos., M.Si	(.....)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novandri Alexander  
NPM : 0606054935  
Program Studi : Perbandingan Politik  
Departemen : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Politik dan Ilmu Sosial  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

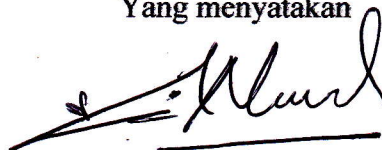
**Peran Kelompok Kaus Merah dalam Menjatuhkan Rezim  
Abhisit Vejjajiva di Thailand (2008-2011)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 27 Juni 2012

Yang menyatakan



(Novandri Alexander)

## ABSTRAK

Nama : Novandri Alexander

Program Studi : Perbandingan Politik

Judul :

### **Peran Kelompok Kaus Merah dalam Menjatuhkan Rezim**

#### **Abhisit Vejjajiva di Thailand (2008-2011)**

Skripsi ini memfokuskan peran kelompok Kaus Merah, seperti melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan melakukan aksi pendudukan di kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah mengakibatkan instabilitas politik dan berpengaruh terhadap menurunnya popularitas Abhisit sebagai PM Thailand. Skripsi ini menggunakan teori kelompok penekan yang dikemukakan oleh Stuart Gerry Brown dan Edmund Burke, dimana kelompok penekan merupakan agen yang sangat penting dari partisipasi politik. Kelompok ini berupaya mempengaruhi dukungan rakyat melalui demonstrasi, petisi, memberikan pendidikan politik bagi anggotanya, dan melakukan aksi pendudukan objek-objek vital yang mengakibatkan situasi politik tidak stabil.

Kata Kunci : Kaus Merah, Abhisit Vejjajiva, Aksi Pendudukan, Sekolah Politik.

## ABSTRACT

Name : Novandri Alexander  
Major : Political Comparison  
Theme :

### **The Role of Red Shirts in Overthrowing Abhisit Vejjajiva's Regime in Thailand (2008-2011)**

This thesis focused at the role of Red Shirts, such as occupied the Royal Cliff Beach Resort, build a political school, and occupied Ratchaprasong business district in Bangkok. Various actions taken by the Red Shirt leads to political instability and take effect on Abhisit, The Prime Minister Of Thailand, to losing his popularity. This thesis looks at the theory of pessure group propounded by Stuart Gerry Brown and Edmund Burke, that Pressure groups are a very important agent of political participation. This groups seek to influence public support through activities such as demonstrations, petitions, provide political education for its members, and occupied on vital objects which resulted in unstable political situation.

Key words : Red Shirts, Abhisit Vejjajiva, Occupy, Political School.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menunjukkan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***"PERAN KELOMPOK KAUS MERAH DALAM MENJATUHKAN REZIM ABHISIT VEJAJIVA DI THAILAND (2008-2011)"***. Skripsi ini disusun merupakan tugas akhir akademis di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang mendalam khususnya kepada:

1. Penulis haturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, Orang tua tercinta, Mohammad Yusuf, Hermine Fransine Manuhutu, dan Adik tersayang Reza Fredly yang selalu memberikan dukungan yang tidak terukur nilainya.
2. Ibu Hurriyah, S.Sos., IMAS, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Cecep Hidayat, S.IP., IMRI, selaku Penguji Ahli yang telah memberikan masukan yang membangun skripsi ini menjadi sempurna.
4. Bapak Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
5. Bapak Donni Edwin, S.Sos., M.Sc, selaku Ketua Program Ekstensi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
6. Bapak Sarnan yang telah membantu dalam urusan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
7. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu politik dan wawasan kepada penulis.
8. Pimpinan dan Staff Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang telah menyediakan fasilitas studi kepastakaan.
9. Keluarga besar Manuhutu, Eddy Hattu, Telly Manuhutu, Marahain William Hattu, Calvin Domingo Hattu, David Manuhutu, Ernawati, Gerry Louis Manuhutu, Bryan Lunggo Manuhutu, Hendrik Manuhutu (Almarhum), Drs. Hendrik Fredrik Simon Manuhutu TNI AD satuan BAIS TNI yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil sampai terselesaikannya skripsi ini.

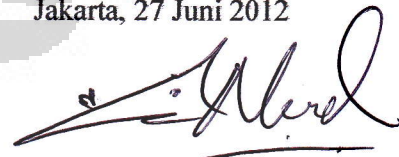


10. Pendeta Kate Fony Barahama-Pattipeilohy, Wendula Rooswitha, Messio Deina Wattimena yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat-Sahabat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Dedy Priatmojo, Wildan Sudi Arman, Decky Bratakusumah, Yulia Kusumawardani, Kartika Sari, Sekar Arum Widara, Raditya Dika, Aditya Bagus Prabowo, Sansen Situmorang, Aileen Marselina, Royman Ananda Moeis, Chintia Natasya, Mirwan Andan, Andika Wahyudi, Yoyarib Mau, Irvan Ridwansyah, Viva Mahani, Nina Maharani, yang telah memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
12. Teman-teman yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, Merry Christianty Takasowa, Hazel Anggia Putri, Noviane Marini Manuhutu, Natasha Armida Christine Maramis, Mariani Angelina Sinaga, Lidya Christin Sinaga, Febri Lisa Handayani, Anggita Purie, Ratna Kusuma, Yoanita Sandra, Feiby Feronika Ondang, Steven Walarange, Tania Mahulete, Endra Supriyatmo, Tia Fesmiyani.
13. Warga Thailand, khususnya para pendukung Kaus Merah di Bangkok dan sekitarnya, Dr. Pavin Chachavalpongpun, Suda Rangkupan, Bernd Weber, Juji Joomjam, Nataria Luchmaria Pasaribu, Anderas Pattinan Pasaribu, Nattapong Sirasittanapatr, Suchada Kallayanee, Piyamon Sangboonreang yang telah memberikan informasi yang sangat membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dan membangun dari pembaca agar dapat menyempurnakan segala kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

*Motto : Takut akan Tuhan adalah awal dari segala ilmu pengetahuan.*

Jakarta, 27 Juni 2012



**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM</b> .....	xii
<b>DATAR TABEL/GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv

### **1. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	10
1.3. Signifikasi Penulisan .....	11
1.4. Tujuan Penulisan .....	12
1.5. Kerangka Teori .....	12
Kelompok Penekan .....	13
1.6. Alur Berpikir .....	16
1.7. Asumsi .....	17
1.8. Metode Penelitian .....	18
1.9. Sistematika Penulisan .....	19

### **2. KEMUNCULAN KELOMPOK KAUS MERAH DAN NAIKNYA ABHISIT SEBAGAI PERDANA MENTERI DI THAILAND**

2.1. Kejatuhan Thaksin Shinawatra dan Munculnya Kelompok Kaus Merah di Thailand .....	22
2.1.1. Dukungan terhadap Thaksin Shinawatra .....	27
2.1.2. Profil Kaus Merah di Thailand .....	31
2.2. Terpilihnya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand .....	35
2.2.1. Konstelasi Politik di Parlemen Pasca Kejatuhan Thaksin Shinawatra .....	36
2.2.2. Kebijakan Pemerintah Abhisit Vejjajiva .....	42
2.2.2.1. Pemberlakuan UU Penghinaan terhadap Kerajaan ( <i>Lèse Majesté</i> ) .....	43

2.2.2.2.	Pemberlakuan UU Keadaan Darurat ( <i>State of Emergency</i> ) .....	47
2.2.2.3.	Pemberlakuan UU Kejahatan Komputer .....	48

**3. PERAN KELOMPOK KAUS MERAH DALAM MENJATUHKAN REZIM ABHSIT VEJJAJIVA DI THAILAND (2008-2011)**

3.1.	Aksi Pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort di Pattaya .....	52
3.2.	Pendirian Sekolah Politik <i>rongrean pathibatngan nor por cho daeng thang pangdin</i> .....	55
3.3.	Aksi Pendudukan Kawasan Bisnis Ratchaprasong di Bangkok .....	59
3.4.	Kejatuhan Rezim Abhsit Vejjajiva .....	66
4.4.	Implikasi Teori .....	68

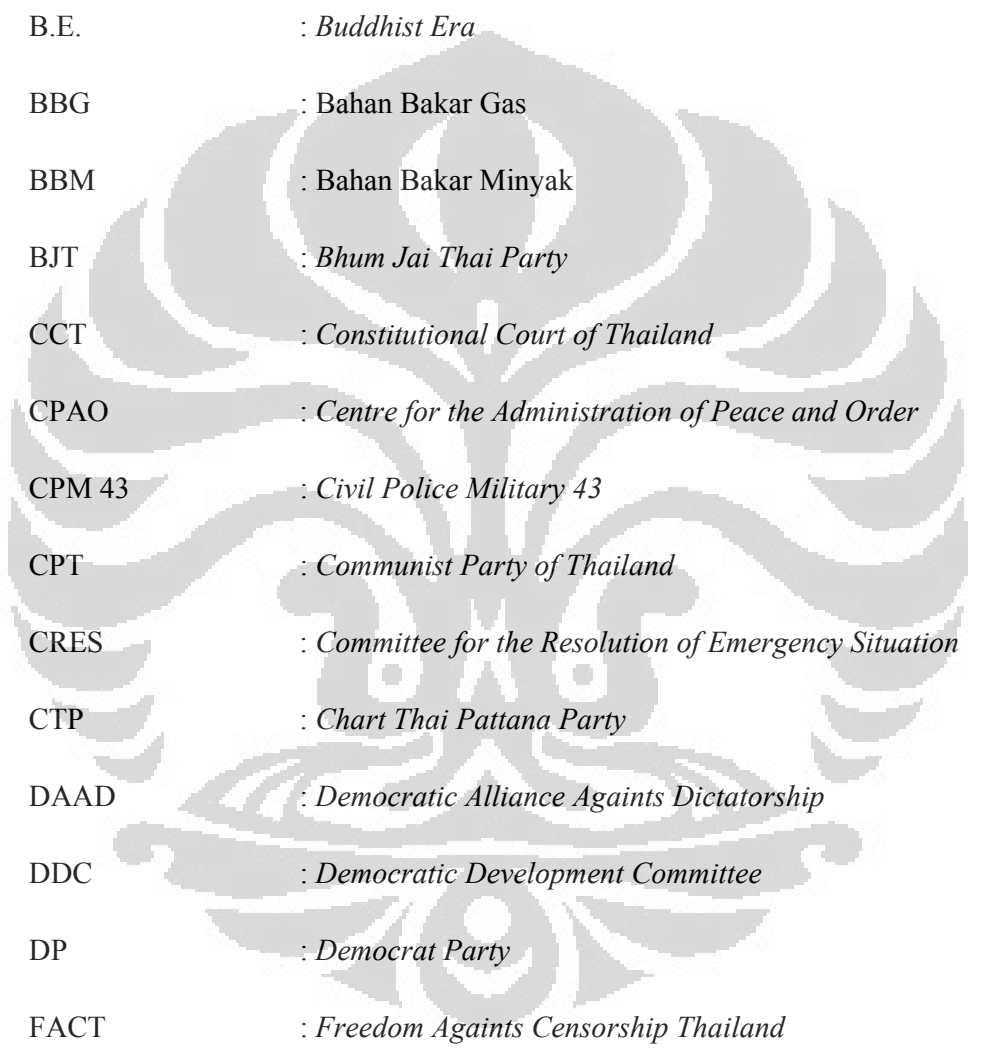
**4. KESIMPULAN .....** 67

**DAFTAR REFERENSI .....** 70

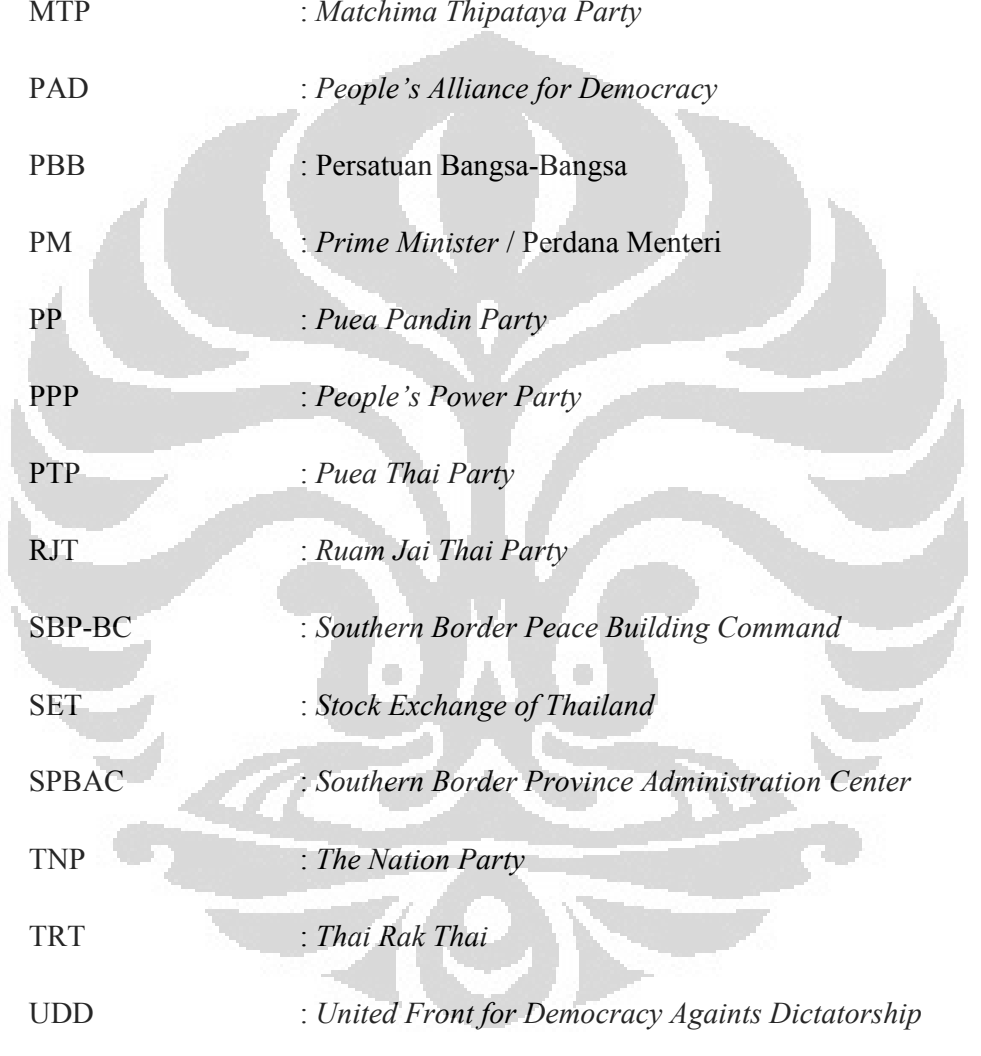
**LAMPIRAN 1**

**LAMPIRAN 2**

## DAFTAR SINGKATAN / AKRONIM



ARI	: <i>Asia Research Institute</i>
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
B.E.	: <i>Buddhist Era</i>
BBG	: Bahan Bakar Gas
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BJT	: <i>Bhum Jai Thai Party</i>
CCT	: <i>Constitutional Court of Thailand</i>
CPAO	: <i>Centre for the Administration of Peace and Order</i>
CPM 43	: <i>Civil Police Military 43</i>
CPT	: <i>Communist Party of Thailand</i>
CRES	: <i>Committee for the Resolution of Emergency Situation</i>
CTP	: <i>Chart Thai Pattana Party</i>
DAAD	: <i>Democratic Alliance Against Dictatorship</i>
DDC	: <i>Democratic Development Committee</i>
DP	: <i>Democrat Party</i>
FACT	: <i>Freedom Against Censorship Thailand</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ICG	: <i>International Crisis Group</i>
ISA	: <i>Internal Security Act</i>



KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MTP	: <i>Matchima Thipataya Party</i>
PAD	: <i>People's Alliance for Democracy</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PM	: <i>Prime Minister</i> / Perdana Menteri
PP	: <i>Puea Pandin Party</i>
PPP	: <i>People's Power Party</i>
PTP	: <i>Puea Thai Party</i>
RJT	: <i>Ruam Jai Thai Party</i>
SBP-BC	: <i>Southern Border Peace Building Command</i>
SET	: <i>Stock Exchange of Thailand</i>
SPBAC	: <i>Southern Border Province Administration Center</i>
TNP	: <i>The Nation Party</i>
TRT	: <i>Thai Rak Thai</i>
UDD	: <i>United Front for Democracy Against Dictatorship</i>
UKM	: Usaha Kecil Menengah
US	: <i>United States</i>
UU	: Undang-Undang
Vol.	: Volume

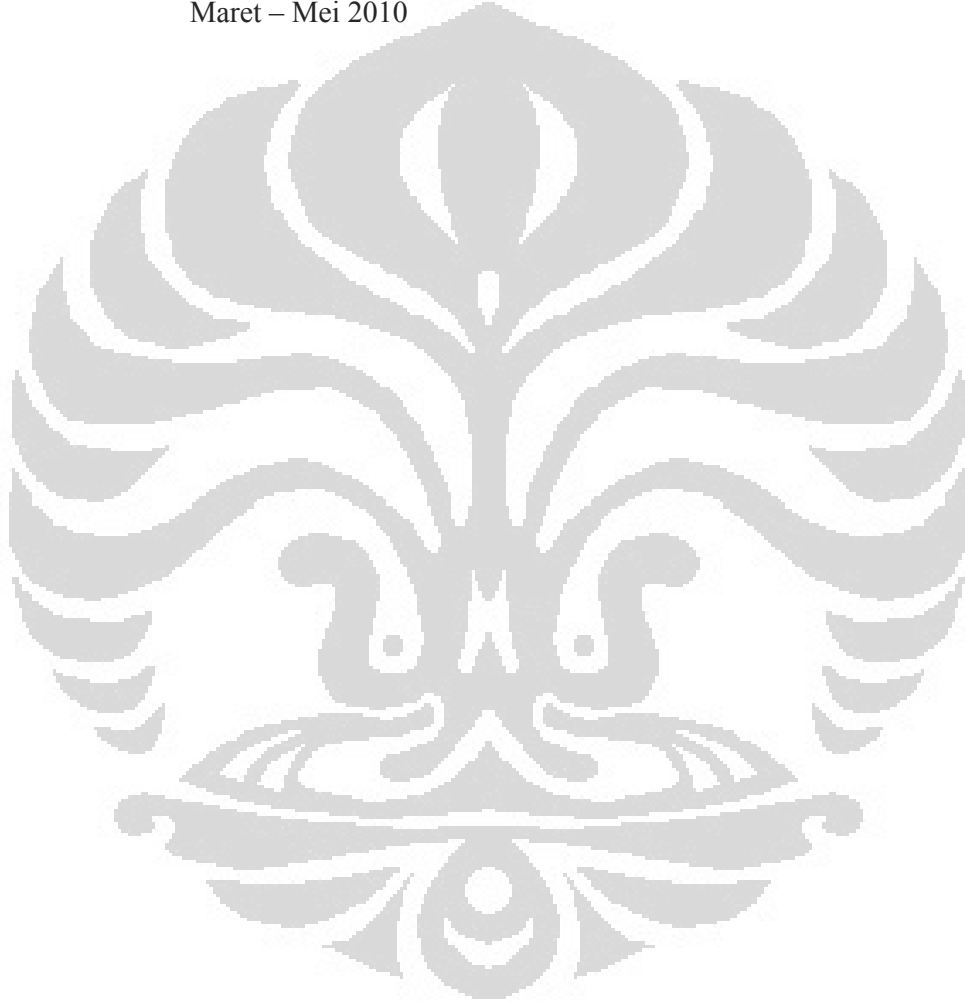
## DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 1.1. Pergantian Rezim di Thailand (2008-2011).....	3
Tabel 2.1. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2001 di Thailand .....	29
Tabel 2.2. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2007 di Thailand .....	37
Tabel 2.3. Konstelasi Kekuatan Partai Politik di Parlemen Thailand (2007-2009) .....	39
Tabel 2.4. Susunan Kabinet Abhisit Vejjajiva pada 17 September 2008 .....	40
Tabel 2.5. Radio Komunitas Kaus Merah yang ditutup Pemerintah Abhisit Vejjajiva di Thailand .....	50
Tabel 3.1. Peran Pemimpin Kaus Merah dalam Sekolah Politik .....	57
Gambar 2.1. Pemimpin dan Faksi-faksi Kaus Merah di Thailand.....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logo Kaus Merah di Thailand

Lampiran 2. Daftar Korban Tewas antara Demonstran dengan Militer bulan  
Maret – Mei 2010



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Krisis politik yang terjadi pada pertengahan tahun 2010 di Thailand, merupakan titik klimaks dari serangkaian aksi protes sejak pecahnya kudeta militer pada 19 September 2006 yang menggulingkan mantan PM (Perdana Menteri) Thaksin Shinawatra. Aksi demonstrasi yang digelar oleh kelompok pro-demokrasi bertujuan untuk menuntut pengunduran diri PM Abhisit Vejjajiva, karena dianggap tidak demokratis atau terpilih tanpa melalui proses pemilu (pemilihan umum). Para pengunjuk rasa juga menyerukan pembubaran parlemen (*House of Representatives*) dan diadakannya pemilu dalam waktu singkat. Para demonstran yang menggunakan atribut berwarna merah menamakan dirinya sebagai UDD (*The United Front for Democracy Against Dictatorship*) atau *Suea Dang* atau biasa dikenal dengan kelompok Kaus Merah, (selanjutnya disebut Kaus Merah).<sup>1</sup>

Sebagian besar massa yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah adalah pendukung mantan PM Thaksin. Menurut kelompok loyalis ini, mereka melihat sosok Thaksin sebagai figur pemimpin yang ideal dengan kebijakan-kebijakan populisnya yang pro-rakyat, khususnya rakyat miskin di pedesaan bagian Utara dan Timur Laut Thailand.<sup>2</sup> Semasa pemerintahannya (2001-2006), popularitas Thaksin semakin meningkat setelah berhasil mengeluarkan kebijakan

---

<sup>1</sup> UDD (*The United Front for Democracy Against Dictatorship*) atau kelompok Kaus Merah awalnya dibentuk pada tahun 2006 dengan nama DAAD (*Democratic Alliance Against Dictatorship*), aliansi ini awalnya melakukan aksi protes menentang kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dari kekuasaan. Kelompok Kaus Merah yang merupakan aliansi petani dan buruh di pedesaan, kemudian diorganisir untuk melakukan aksi protes selama kekuasaan berada di bawah pemerintahan Junta Militer (2006-2007), dan menentang Konstitusi 2007 yang merupakan bentukan militer. Kaus Merah menghentikan aksinya setelah pemerintah Junta mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2007, dimana pemilu dimenangkan oleh partai PPP. Giles Ji Ungpakorn, *Thailand's Crisis and the Fight for Democracy*, (U.K.: WDPress, 2010), hlm. 9.

<sup>2</sup> Thomas Fuller, "Thai Protesters Dig in, Stopping Military Train", diperoleh dari : <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9502E0DF113EF930A15757C0A9669D8B63&sc p=5&sq=red+shirt+in+thailand&st=nyt>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2011, pada pukul 19.00 WIB.



populis dalam bidang ekonomi atau biasa dikenal dengan sebutan *Thaksinomics*.<sup>3</sup> Melalui program kerja populis yang dijalankan oleh pemerintahan Thaksin, ia bersama partainya TRT (*Thai Rak Thai*) berhasil memenangkan pemilu tahun 2001, 2005, dan 2006. Semasa pemerintahannya, Thaksin dapat dikatakan berhasil dalam memulihkan perekonomian di negaranya. Namun, dibalik kesuksesannya ada beberapa kebijakan yang mengakibatkan krisis dan mengganggu stabilitas politik di Thailand, terutama masalah penanganan masyarakat Muslim di wilayah Thailand Selatan dan masalah anti-narkoba yang kental sekali dengan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini yang mendorong militer dalam melakukan aksi kudeta pada September 2006.

Selama empat tahun (2006-2010), rakyat Thailand telah menjadi korban dari berbagai serangan sistematis yang tidak henti-hentinya terhadap hak dasar mereka dalam menentukan pemimpinnya melalui proses pemilu. Sejak tahun 2008, perseteruan antara PAD (*People's Alliance for Democracy*)<sup>4</sup> atau kelompok Kaus Kuning dengan PPP (*People's Power Party*) semakin panas mewarnai perpolitikan nasional Thailand. Krisis politik berlanjut di tahun (2009-2010), kali ini perseteruan antara PM Abhisit Vejjajiva dari DP (*Democrat Party*) dengan kelompok Kaus Merah.<sup>5</sup> Sselanjutnya partai Demokrat disebut DP. Dalam kurun waktu (2008-2010), Thailand telah mengalami empat kali pergantian rezim yang

<sup>3</sup> *Thaksinomics* merupakan istilah sebuah program kerja Thaksin dalam bidang ekonomi, sasaran utamanya adalah rakyat miskin di pedesaan. Kebijakan populis tersebut meliputi, kesehatan murah, pinjaman kredit, pembangunan di desadan meningkatkan layanan teknologi di bidang pertanian. Istvan Rado, *Thaksinomics in Light of the Heterodox View on Economic Development*, Journal of Contemporary Eastern Asia, Volume 7, No.1, hlm. 22-29. Diunduh dari : <http://www.eastasia.at/download/rado.pdf>, diakses pada tanggal 19 Februari 2011, pada pukul 19.00 WIB.

<sup>4</sup> PAD (*People's Alliance for Democracy*) atau kelompok 'Kaus Kuning' merupakan sebuah aliansi yang menentang Thaksin, yang mayoritas anggotanya merupakan warga kelas menengah Thailand dan didukung oleh konglomerat media, Sondhi Limthongkul dan politisi Chamlong Srimuang (mantan ketua PDP). 'Kaus Kuning' juga sempat membentuk partai politik di bawah nama *The Mass Party*, yang akhirnya bubar tidak lama setelah militer berhasil mengukudeta Thaksin pada bulan September 2006. 'Kaus Kuning' kembali menggelar aksi menuntut penurunan dua orang PM yang berasal dari PPP (Samak dan Somchai), karena dianggap sebagai boneka Thaksin yang ingin mengamandemen Konstitusi 2007. Giles Ji Ungpakorn, *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

<sup>5</sup> Daria Redanskikh, *Legitimacy Crisis and Thailand's Road to National Reconciliation*, Master's Thesis, awarded by the Philosophical Faculty of Albert-Ludwigs- Universität Freiburg (Germany) and the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO- Buenos Aires (Argentina), Wintersmester 2010/2011, Social Sciences, hlm. 4. Diunduh dari : <http://www.gsp.uni-freiburg.de/research/redanskikh.2011.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2012, pada pukul 20.00 WIB.

begitu singkat akibat dari berbagai serangan politik. Tabel berikut ini adalah proses terjadinya pergantian rezim pasca pemerintahan Junta Militer hingga terpilihnya Abhisit Vejjajiva dan sebab keruntuhan rezim.

**Tabel 1.1.**  
**Pergantian Rezim di Thailand (2008-2011)**

No	Perdana Menteri	Periodesasi	Sebab Keruntuhan Rezim
1.	Samak Sundaravej	29 Januari - 8 September 2008	<p><b>Faktor Internal :</b> Diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima bayaran pada dua acara kuliner di TV Thailand.</li> <li>Upaya mengamandemen Konstitusi 2007.</li> <li>Dianggap sebagai boneka Thaksin.</li> </ol> <p><b>Faktor Eksternal :</b> Tekanan dari kelompok Kaus Kuning.</p>
2.	Somchai Wongsawat	18 September - 2 Desember 2008	<p><b>Faktor Internal :</b> CCT membubarkan PPP, karena terbukti melakukan kecurangan pada pemilu 2007.</p> <p><b>Faktor Eksternal :</b> Tekanan dari kelompok Kaus Kuning dengan melakukan okupasi dua bandara Internasional (Suvarnabhumi dan Don Muang). Somchai dianggap sebagai boneka Thaksin karena masih ada hubungan keluarga (sepupu).</p>
3.	Chaovarat Chanweerakul (Pejabat Sementara)	2 – 17 Desember 2008	Chaovarat menjabat sebagai PM sementara karena saat itu parlemen masih di dominasi oleh partai PPP. Walaupun PPP saat itu sudah dibubarkan.
4.	Abhisit Vejjajiva	17 Desember 2008-5 Agustus 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tekanan dari kelompok Kaus Merah dengan melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya dan menggagalkan ASEAN-Summits.</li> <li>Kaus Merah mendirikan sekolah politik untuk merekrut massa yang lebih besar dalam menggelar aksi protes di tahun 2010.</li> <li>Tahun 2010, Kaus Merah kembali melakukan aksi pendudukan kawasan bisnis Ratchaprasong, di Bangkok.</li> </ol>

Sumber : Diolah dari beberapa sumber.

Dari Tabel 1.1. di atas terlihat transisi pergantian rezim yang sangat singkat selama tahun 2008. Dalam perodesasi tersebut, Thailand sendiri mengalami empat kali pergantian PM, dimulai dari Samak Sundaravej, Somchai Wongsawat, Chaovarat Chanweerakul (pejabat sementara), sampai terpilihnya Abhisit Vejjajiva. Dalam konteks Thailand, pergantian rezim tidak terlepas dari peran kedua faksi yang berpengaruh terhadap keruntuhan suatu rezim, yaitu kelompok Kaus Merah dan Kaus Kuning. Pada akhir tahun 2008, krisis politik kembali menyelimuti perpolitikan Thailand, setelah Mahkamah Konstitusi atau CCT (*Constitutional Court of Thailand*)<sup>6</sup> membubarkan PPP karena terbukti melakukan kecurangan pada pemilu 2007.

Pemerintah menggelar pemungutan suara (*voting*) di parlemen pada 15 Desember 2008.<sup>7</sup> DP merupakan partai oposisi terbesar di parlemen berpeluang mengambil alih kekuasaan setelah dibubarkannya PPP. Keberhasilan DP dalam menggalang koalisi baru bersama partai lainnya membuat dirinya berada dipuncak kekuasaan.<sup>8</sup> Hal ini bertujuan agar koalisi baru yang dipimpin DP dapat memenuhi persyaratan dua per tiga kursi di parlemen. DP mendapatkan dukungan dari lima partai di parlemen, antara lain CTP (*Chart Thai Party / The Nation Party*), RJT (*Ruam Jai Thai Party / Thais United National Development Party*), BJT (*Bhum Jai Thai Party*), PP (*Puea Pandin / The Motherland Party*), dan MTP (*Matchima Thipataya Party / Neutral Democratic Party*).<sup>9</sup> Sementara dipihak lain, partai Praharaj dan beberapa anggota dari PP termasuk Mun Patanothai selaku ketua partai tetap setia berdiri dibarisan PTP

<sup>6</sup> CCT (*Constitutional Court of Thailand*) atau Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat publik, membubarkan partai politik, menguji keputusan kerajaan, dan menguji konstitusi yang dibuat oleh anggota parlemen. Diunduh dari : <http://www.constitutionalcourt.or.th/english/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pada pukul 22.00 WIB.

<sup>7</sup> Jenny Percival, "Thai Oposition Leader Becomes PM", diunduh dari : <http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/15/thailand-prime-minister>, diakses pada tanggal 2 Januari 2011, pada pukul 13.00 WIB.

<sup>8</sup> Michael K. Connors, *Thailand's Emergency State Struggles and Transformations*, Southeast Asian Affairs, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2011), hlm. 228.

<sup>9</sup> The Nation, "Democrats Claim Majority to Form Government", diunduh dari : [http://www.nationmultimedia.com/2008/12/07/politics/politics\\_30090358.php](http://www.nationmultimedia.com/2008/12/07/politics/politics_30090358.php), diakses pada tanggal 2 Januari 2011, pada pukul 19.30 WIB.

(*Puea Thai Party*).<sup>10</sup> Chai Chidchob sebagai juru bicara Majelis Rendah menyatakan bahwa DP berhasil memperoleh 235 kursi setelah mengalahkan Pracha Promnok dari PP yang hanya meraih 198 kursi di parlemen.<sup>11</sup> Chai juga menambahkan bahwa Abhisit berhasil menang lebih dari separuh suara dan ia terpilih sebagai PM Thailand yang baru.

Abhisit Vejjajiva secara resmi diangkat oleh Raja Bhumibol Adulyadej sebagai PM Thailand terhitung sejak 17 Desember 2008.<sup>12</sup> Beberapa jam sebelum pelantikan Abhisit, melalui Jurin Laksanawasi selaku ketua komite penyusunan kebijakan, sekaligus Menteri Pendidikan mengutarakan bahwa pemerintah Abhisit akan merencanakan kebijakan populis yang menitikberatkan pada penyuntikan dana pembangunan ke pelosok Thailand. Hal ini bertujuan agar taraf hidup petani-petani yang ada di pedesaan semakin meningkat. Program tersebut meliputi sejumlah proyek baru, seperti dana pensiun dan subsidi bagi petani yang lahannya terendam banjir.<sup>13</sup> Pemerintah Abhisit berusaha mengambil hati rakyat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis, tetapi justru mendapat tekanan dari kelompok pro-Thaksin.

Pemerintahan Abhisit yang didukung oleh kelas menengah Bangkok, militer, dan Raja Bhumibol Adulyadej, berjanji akan mengembalikan stabilitas politik yang terjadi sejak pecahnya kudeta militer 2006. Pemerintah juga akan menindak tegas bagi setiap warga negara yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tindakan *Lèse Majesté* atau penghinaan terhadap kerajaan. Program ini berada dibawah kendali Kementerian Teknologi dan Informasi Thailand menutup 2.300 situs internet yang terbukti melakukan pelanggaran atas *Lèse Majesté*, sedangkan 200 situs lainnya sedang dalam proses penutupan.<sup>14</sup> Situs-situs yang

<sup>10</sup> PTP (*Phue Thai Party*) didirikan pada 20 September 2008, partai ini didirikan sebagai pengganti partai PPP, yang dibubarkan 3 bulan berikutnya. PTP dibentuk untuk mengantisipasi agar kekuasaan Thaksin tidak punah, sehingga kubu Thaksin masih memiliki keterwakilan di parlemen. PTP merupakan reinkarnasi dari PPP dan TRT yang dibubarkan oleh CCT pada bulan Desember 2008 dan Mei 2007. Keanggotaan PTP merupakan anggota dari partai PPP dan TRT yang tidak terjerat sanksi larangan berpolitik selama lima tahun.

<sup>11</sup> "Thai Opposition Head to be New PM", diunduh dari : <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7782950.stm>, diakses pada tanggal 3 Januari 2011, pada pukul 23.00 WIB.

<sup>12</sup> "Thai King Endorses New PM Abhisit", diunduh dari : <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7787505.stm>, diakses pada tanggal 5 Januari 2011, pada pukul 19.00 WIB.

<sup>13</sup> Media Indonesia, *Abhisit Rencanakan Kebijakan Populis*, Selasa, 23 Desember 2008.

<sup>14</sup> Giles Ji Ungpakorn, *Op. Cit.*, hlm 47.

telah melakukan pelanggaran *Lèse Majesté* berada dibawah kendali kelompok Kaus Merah. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 80 juta Bath untuk menyukseskan program pencegahan atas pelanggaran *Lèse Majesté*.<sup>15</sup>

Bentuk penolakan terhadap Abhisit ditandai dengan aksi protes yang digelar oleh kelompok Kaus Merah di awal pemerintahannya. Massa pendukung Thaksin awalnya adalah aliansi petani dan rakyat miskin di pedesaan, sedikitnya terdapat 320 desa di provinsi Udon Thani dan Khon Kaen dijuluki sebagai “*Red Shirt Villages*”.<sup>16</sup> Namun, dalam aksinya menentang pemerintahan Abhisit, kelompok ini semakin membesar seperti “bola salju”. Mereka mendapatkan dukungan dari anggota Kaus Merah lainnya di wilayah Utara dan Timur Laut Thailand, khususnya di provinsi Chiang Mai, Chiang Rai, Udon Thani, Khon Kaen, dan Ubon Ratchathani. Daerah ini merupakan basis terbesar massa pendukung Thaksin, karena semasa pemerintahannya mereka sangat merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan populis Thaksin. Massa yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah berasal dari berbagai profesi, yaitu aktivis petani, rakyat miskin, pekerja yang berpenghasilan rendah, pro-demokrasi, aktivis serikat buruh, mantan komunis, dan tentara yang membelot dari pemerintah.

Dibalik aksi protes ini, Thaksin juga melancarkan serangan politik melalui rekaman video yang menyatakan bahwa Prem Tinsulanonda, Surayud Chulanont, dan Chancai Likhitjitha dianggap sebagai otak yang mendalangi kudeta terhadap dirinya pada tahun 2006. Thaksin juga menambahkan bahwa intervensi mereka dalam urusan politik membawa negara ini ke dalam kekacauan.<sup>17</sup> Mereka menggelar aksi protes dan menunjukkan kemarahannya dengan merusak pintu gerbang parlemen dan menghancurkan mobil anggota parlemen yang berasal dari DP. Mereka melayangkan tuntutan agar Abhisit mundur dari kursi PM dan segera membubarkan parlemen, serta menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu singkat. Dari sinilah dapat dilihat reaksi dari kemarahan kelompok

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>16</sup> Jason Szep & Ambika Ahuja, “In Thailand’s Red Shirt Villages, Defiance Ahead of Elections”, diunduh dari : <http://www.reuters.com/article/2011/06/07/us-thailandelection-idUSTRE75614T20110607>, diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pada pukul 20.00 WIB.

<sup>17</sup> The Nation, “Thaksin Called for Prem and Surayud to Stop Intervene in Politics”, diunduh dari : [http://www.nationmultimedia.com/2009/03/27/politics/politics\\_30099071.php](http://www.nationmultimedia.com/2009/03/27/politics/politics_30099071.php), diakses pada tanggal 20 Februari 2012, pada pukul 19.00 WIB.

pro-Thaksin yang menganggap bahwa adanya “kudeta terselubung” (*silent coup*) yang diperankan oleh kelompok Kaus Kuning, militer, dan kelompok royalis lainnya.<sup>18</sup>

Para pengunjuk rasa menggelar aksi protes di depan gedung parlemen dan sekitar Royal Plaza yang berjumlah 100.000 orang.<sup>19</sup> Pemimpin Kaus Merah yang menonjol yaitu, Veera Muskaphong, Jatuporn Promphan, Nattawut Saikuea, mengumumkan bahwa tanggal 8 April 2009 adalah hari untuk meruntuhkan pemerintahan aristokrasi (*The Day for Fall of Aristocratic Polity*). Mereka menuntut agar Abhisit, Prem, Surayud, dan Chanchai agar mengundurkan diri dalam waktu 24 jam, jika tidak mereka akan mengerahkan massa yang lebih besar dalam aksi berikutnya.<sup>20</sup> Massa yang terkoordinasi berhasil mengepung kantor PM Abhisit dan mereka menuntut agar ia mundur dari jabatannya, membubarkan parlemen, dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat, serta mengembalikan Konstitusi Rakyat 1997 (*People's Constitution*)<sup>21</sup> yang dibekukan semasa pemerintahan junta militer.<sup>22</sup>

Pecahnya insiden April 2009 merupakan indikasi hilangnya hukum dan keamanan di negeri Gajah Putih. Dalam hal ini, kelompok Kaus Merah berhasil menduduki Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, dimana tempat diselenggarakannya pertemuan para pemimpin-pemimpin negara ASEAN

<sup>18</sup> Jonathan, “Mountain to Climb for the New Thai PM”, diunduh dari : <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7783650.stm>, diakses pada tanggal 3 Januari 2011, pada pukul 22.20 WIB.

<sup>19</sup> Kittipong Soonprasert, “Update 4-Anti-Govt Rally in Bangkok, PM says Asia Summit on”, diunduh dari : <http://in.reuters.com/article/2009/04/08/thailand-politics-idINBKK47086420090408>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2010, pada pukul 22.00 WIB.

<sup>20</sup> “Red Shirt Mass in March”, diunduh dari : <http://www.bangkokpost.com/news/local/169417/red-shirts-mass-rally-in-march>, diakses pada tanggal 4 September 2010, pada pukul 14.00 WIB

<sup>21</sup> Konstitusi 1997 atau Konstitusi Rakyat merupakan Undang-Undang Dasar baru Thailand yang dibentuk melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Konstitusi yang terdiri dari 12 bab dan 336 bagian ini merupakan tuntutan rakyat sejak 1992 atas reformasi Konstitusi. Sehubungan dengan reformasi konstitusi tersebut, pemerintahan PM Chuan Leekpai membentuk DDC (*The Democratic Development Committee*). Penyusunan dan pengesahan konstitusi baru dilaksanakan pada Oktober 1997. Di dalam konstitusi ini dibahas mengenai pemimpin militer yang tidak mempunyai peluang menjadi perdana menteri. Ludiro Madu, SIP, M. Si, *Keajaiban Thailand: Analisis Deskriptif Tentang Asal-Usul Dan Pemulihan Krisis Ekonomi*, (Surabaya: JP-Press, 2003), hlm. 119-123.

<sup>22</sup> Shawn W. Crispin, “Seeing Red in Thailand”, diperoleh dari : <http://www.atimes.com/atimes/Southeast Asia/KD04Ae01.html>, diakses pada tanggal 19 September 2010, pada pukul 11.00 WIB.

(*Association of Southeast Asian Nations*), ditambah dengan pemimpin China, Korea, Jepang, dan Australia.<sup>23</sup> Insiden ini memaksa para peserta dievakuasi ke tempat yang aman dari serangan kelompok pro-Thaksin. Hal ini juga menodai reputasi Thailand sebagai “tuan rumah” KTT-ASEAN di Pattaya.

Ironisnya, Newin Chidchob serta beberapa anggota DP membentuk laskar atau kelompok Kaus Biru guna melawan kelompok Kaus Merah.<sup>24</sup> Insiden di Pattaya juga diikuti dengan pecahnya kerusuhan di kota Bangkok. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah membuat pemerintah mengeluarkan status darurat di negaranya (*State of Emergency*). Peristiwa yang sangat menodai reputasi Thailand sebagai tuan rumah ASEAN-Summits terjadi bersamaan dengan liburan *Songkran*<sup>25</sup> atau tahun baru Thailand. Pemerintah mengerahkan pasukan kepolisian dan militer untuk membubarkan aksi protes di Pattaya dan Bangkok. Pembubaran paksa yang dilakukan pemerintah membuat para demonstran mundur ke markas mereka masing-masing di pedesaan.

Para pemimpin Kaus Merah menganalisis gagalnya aksi pada bulan April 2009. Oleh karena itu, mereka merencanakan strategi baru untuk mempersiapkan aksi yang lebih besar pada bulan April 2010 mendatang. Mereka mendirikan sekolah politik (dalam bahasa Thai, *rongrean pathibatngan nor por cho daeng thang pangdin*) yang bertujuan untuk membekali anggota tentang demokrasi agar mereka punya tujuan yang jelas dan terarah dalam melakukan aksi berikutnya. Dengan didirikannya sekolah politik ini, kelompok Kaus Merah berhasil merekrut ribuan anggotanya di pedesaan bagian Utara dan Timur Laut Thailand.

<sup>23</sup> Rodolfo C. Severino, *Pattaya Demonstrations: ASEAN Dealt a Blow – but not a Fatal One*, for Strait Times, 20 April 2009. Diunduh dari : <http://www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre/ascp14-09.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2011, pada pukul 22.00 WIB.

<sup>24</sup> Giles Ji Ungpakorn, *Class Struggle between the Coloured T-Shirt in Thailand*, Journal of Asia Pacific Studies Vol 1, No. 1, hlm 76-100. Diunduh dari : <http://journal.vpweb.com/upload/Sungpakorn.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2011, pada pukul 01.30 WIB.

<sup>25</sup> *Songkran* adalah tahun baru tradisional Thailand. Kata *Songkran* berarti “melewati”, berasal dari bahasa sansekerta yang menjelaskan pergerakan matahari terhadap rasi-rasi bintang. Saat Matahari bergerak menuju Aries maka tiba saatnya rakyat Thailand merayakan *Songkran*. Perayaan *Songkran* diselenggarakan setiap tanggal 13-15 April setiap tahunnya. Biasanya perayaan festival *Songkran* rakyat Thailand turun ke jalan kemudian membaur dengan masyarakat lain dan turis untuk perang air.

Krisis politik berlanjut di awal tahun 2010, setelah MA (Mahkamah Agung) mengeluarkan putusan tentang penyitaan aset Thaksin Shinawatra sebesar US\$ 1.4 miliar pada 26 Februari 2010.<sup>26</sup> Menurut Paul Chambers selaku peneliti senior politik Thailand, di Universitas Heidelberg-Jerman menyatakan bahwa vonis terhadap aset Thaksin sama saja memberikan ruang bernapas bagi massa pendukungnya, yakni kelompok Kaus Merah. Kelompok loyalis ini suatu saat akan meletus seperti ledakan vulkanis dimasa yang akan datang.<sup>27</sup> Thitinan Pongsudhirak juga berpendapat mengenai putusan MA Thailand terhadap Thaksin, ia menyatakan bahwa keputusan MA tersebut merupakan konsesi elit politik Thailand bagi Thaksin agar menghentikan tekanan dari tempat pengasingannya di luar negeri.

Kelompok Kaus Merah yang telah terkoordinasi, mereka melancarkan aksi protes selama dua bulan (Maret-Mei 2010) dengan melakukan okupasi kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Hal ini mengakibatkan perekonomian Thailand terganggu dengan aksi protes ini. Bentrokan antara militer dengan para demonstran tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. Militer mulai menggunakan senjata dalam mencegah dan membubarkan massa. Hal ini sudah ketiga kalinya terjadi militer menembaki para pengunjung rasa sejak tahun 1973, 1992, dan 2010. Insiden tersebut setidaknya mengakibatkan 91 orang meninggal dunia dan 2.100 orang terluka. Dalam insiden Mei 2010, Seh Daeng<sup>28</sup> adalah salah satu dari 91 korban meninggal dunia.<sup>29</sup>

Dari latar belakang di atas, kelompok Kaus Merah berperan dalam menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva dengan melakukan berbagai aksi demonstrasi yang menciptakan situasi kerusuhan (*chaos*) dan ketidakstabilan politik semasa pemerintahannya. Berbagai serangan aksi protes yang dilayangkan oleh kelompok Kaus Merah terhadap pemerintahan Abhisit sepanjang tahun

<sup>26</sup> “Background note : Thailand”, diunduh dari : <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm>, diakses pada tanggal 3 November 2011, pada pukul 22.00 WIB.

<sup>27</sup> “Kekacauan Politik Berlanjut”, diunduh dari : <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=46353>, diakses pada tanggal 7 November 2011, pada pukul 23.00 WIB.

<sup>28</sup> Seh Daeng merupakan julukan bagi seorang perwira tinggi militer, yaitu Mayjen. Khattiya Sawasdipol. Selama bentrokan ia melindungi barisan kelompok ‘Kaus Merah’ dari seragan pemerintah. Ia merupakan seorang Jenderal yang berontak terhadap pemerintahan Abhisit.

<sup>29</sup> “Accountability Project”, diunduh dari : <http://www.thaiaccountability.org/the-dead/?lang=e>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012, pada pukul 20.20 WIB. Lihat Lampiran 2.



2008-2011 yang mengakibatkan instabilitas politik di Thailand. Diawal pemerintahan Abhisit, kelompok pro-Thaksin yang menggunakan atribut berwarna merah ini melakukan pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya dalam menggagalkan ASEAN-Summits di Pattaya. Para pemimpin Kaus Merah juga mendirikan sekolah politik dalam menggalang kekuatan yang lebih besar dalam aksinya di tahun 2010. Akhirnya, insiden April-Mei 2010 pecah di kawasan bisnis Ratchaprasong, Bangkok. Massa yang telah terkoordinasi melakukan pendudukan kawasan tersebut dan melumpukan perekonomian Thailand. Dengan demikian, berbagai aksi yang digelar oleh kelompok Kaus Merah berpengaruh terhadap kejatuhan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand. Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk dijadikan sebagai penulisan ilmiah. Oleh karena itu, penulis berusaha mengangkat tema yang berjudul “*Peran Kelompok Kaus Merah dalam Menjatuhkan Rezim Abhisit Vejjajiva Tahun di Thailand (2008-2011)*” sebagai skripsi di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Kelompok Kaus Merah merupakan kelompok pro-demokrasi yang lahir sebagai bentuk protes atas terpilihnya Abhisit Vejjajiva karena tidak melalui proses pemilu. Ketidakpuasan kelompok loyalis ini ditandai dengan berbagai aksi protes dalam menekan pemerintahan Abhisit agar mundur dari kursi PM dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand melalui pemilu. Kekerasan yang terjadi semasa pemerintahan Abhisit mengakibatkan banyaknya korban jiwa setelah militer mulai menggunakan senjata dalam mencegah dan membubarkan para demonstran.

Para pemimpin Kaus Merah memobilisasi massa yang besar dalam aksinya ditandai dengan didirikannya sekolah politik agar anggotanya memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam melakukan tekanan terhadap Abhisit. Massa yang terkoordinasi berhasil menciptakan situasi kerusuhan di Bangkok dan provinsi di sekitarnya. Aksi demonstrasi yang digelar oleh kelompok loyalis ini

semakin terbuka, berani, dan langsung menyentuh pusat-pusat pemerintahan dengan mengadopsi pola-pola strategi perjuangan untuk mewujudkan demokrasi sejati di Thailand. Oleh karena itu, aksi ini menjadi sangat terkoordinasi, tertata rapi, dan terarah.

Keberhasilan massa pendukung Thaksin dalam melakukan tekanan terhadap pemerintah Abhisit ditandai dengan terbentuknya suatu wadah yang bertujuan dalam memperjuangkan demokrasi di Thailand, yaitu kelompok Kaus Merah. Wadah inilah yang kemudian menjadi sangat penting sebagai motor penggerak dalam sebuah gerakan yang besar dalam meruntuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand. Agar penelitian yang penulis lakukan ini lebih terarah, maka penulis merumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, *Bagaimana peran kelompok Kaus Merah dalam menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand (2008-2011)?*

### **1.3. Signifikansi Penulisan**

Kenaikan Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand yang terpilih tanpa proses pemilihan umum mengundang aksi protes kelompok Kaus Merah. Berbagai aksi protes yang dilancarkan oleh kelompok loyalis Thaksin, seperti melakukan aksi demonstrasi, okupasi, dan mobilisasi yang mengakibatkan instabilitas politik di Thailand. Massa yang terkoordinasi berhasil menggalang sebuah kekuatan besar dari berbagai daerah, khususnya bagian Utara dan Timur Laut Thailand. Berbagai aksi yang digelar oleh kelompok Kaus Merah di Thailand, maka hal ini berdampak pada menurunnya popularitas Abhisit Vejjajiva.

Penulisan ini diperlukan untuk menambah referensi bahan bacaan mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik dengan kelompok Kaus Merah sebagai kelompok penekan di Thailand. Penulisan ini juga merupakan upaya memberikan kontribusi pada peran Kaus Merah dalam melakukan aksi protes terhadap pemerintahan Abhisit di Thailand (2008-2011). Oleh karena itu, penulis mengkaji peran kelompok Kaus Merah terhadap kejatuhan rezim Abhisit, serta

memfokuskan pada aksi-aksi yang dilakukan kelompok Kaus Merah, sehingga mengakibatkan instabilitas politik dan menurunnya popularitas Abhisit di Thailand.

#### **1.4. Tujuan Penulisan**

1. Memberikan gambaran munculnya kelompok Kaus Merah di Thailand.
2. Menjelaskan peran kelompok Kaus Merah dalam menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand (2008-2011).
3. Menjelaskan aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah yang mengakibatkan instabilitas politik dan menurunnya popularitas Abhisit Vejjajiva.

#### **1.5. Kerangka Teori**

Krisis politik yang terjadi pasca kudeta militer tidak berdarah tahun 2006 menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Thailand. Kudeta militer 2006 melahirkan aksi protes yang digelar oleh kelompok Kaus Merah yang loyal terhadap Thaksin Shinawatra. Kelompok Kaus Merah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akar krisis politik yang terjadi pasca kudeta militer 2006. Krisis politik berlanjut setelah Abhisit Vejjajiva terpilih sebagai PM Thailand tanpa melalui proses pemilu. Hal ini direspon oleh kelompok pro-Thaksin dengan melakukan berbagai aksi protes yang menyebabkan ketidakstabilan politik semasa pemerintahan Abhisit. Kelompok ini menekan pemerintah agar membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru untuk menentukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat Thailand. Tekanan ini datang karena ketidakpuasan massa pendukung Thaksin atas kebijakan-kebijakan Abhisit yang dianggap diktaktor. Dengan demikian, penulis menggunakan teori kelompok penekan dalam menganalisa kelompok Kaus Merah di Thailand.

## Kelompok Penekan

Kelompok penekan (*pressure group*) merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.<sup>30</sup> Masyarakat politik bukanlah masyarakat yang statis, akan tetapi mereka melakukan kegiatannya secara dinamis karena mereka berada dalam kehidupan politik yang demokratis. Hal ini yang menyebabkan masyarakat politik mempunyai kelompok-kelompok berbeda dan setiap kelompok itu akan terus memperjuangkan berbagai kepentingan mereka melalui cara-cara politik yang ada.

Kelompok penekan adalah organisasi yang berusaha mempengaruhi pemerintah dari luar. Mereka tidak menempatkan kandidat untuk pemilihan atau mencari cara lain untuk merebut kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini, mereka adalah bagian dari masyarakat sipil. Menurut Edmund Burke kelompok penekan adalah mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, peran politik mereka bisa dikatakan tidak jelas (*fuzzy*).

Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang digunakan melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain : kelompok pengusaha, kelompok industriawan, kelompok petani, kelompok pekerja, dan sebagainya.

Kelompok penekan memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Mereka berusaha untuk menggunakan pengaruh dari luar, bukan untuk menang ataupun menjalankan kekuasaan pemerintah. Kelompok penekan tidak membuat kebijakan, melainkan mencoba untuk mempengaruhi mereka yang membuat kebijakan. Dalam hal ini, kelompok penekan adalah faktor eksternal dari pemerintah.

<sup>30</sup> Sugianto dan Bambang S., *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Surakarta: Grahadi, 2007), hlm. 177.

<sup>31</sup> "Pressure Groups", diunduh dari : <http://www.palgrave.com/PDFs/0230201733.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juni 2012, pada pukul 19.00 WIB.

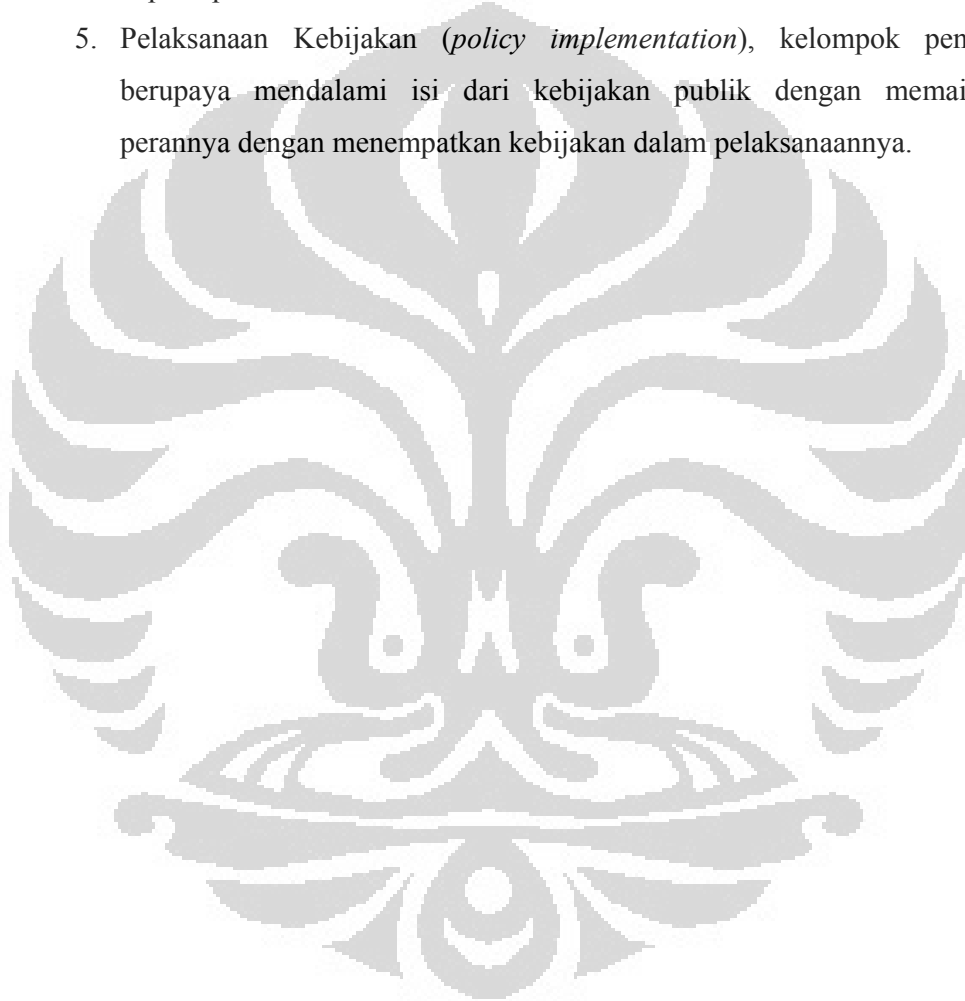
2. Mereka biasanya memiliki sebuah tujuan dalam tuntutan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka hanya fokus pada satu masalah saja, misalnya kelompok Kaus Merah yang menentang Abhisit Vejjajiva di Thailand.
3. Anggota mereka biasanya disatukan dengan ideologi yang sama yang tergabung dalam satu wadah organisasi. Walaupun ada anggota yang berasal dari partai yang berbeda, dengan satu tujuan mereka dapat bekerjasama sebagai anggota kelompok penekan.
4. Mereka menggunakan pemilu sebagai senjata dalam perjuangannya sebagai sarana untuk mendapatkan publisitas dan menarik perhatian media.
5. Kelompok penekan dapat menjadi sebuah gerakan sosial yang lebih besar.

Kelompok penekan memiliki beberapa fungsi, antara lain :

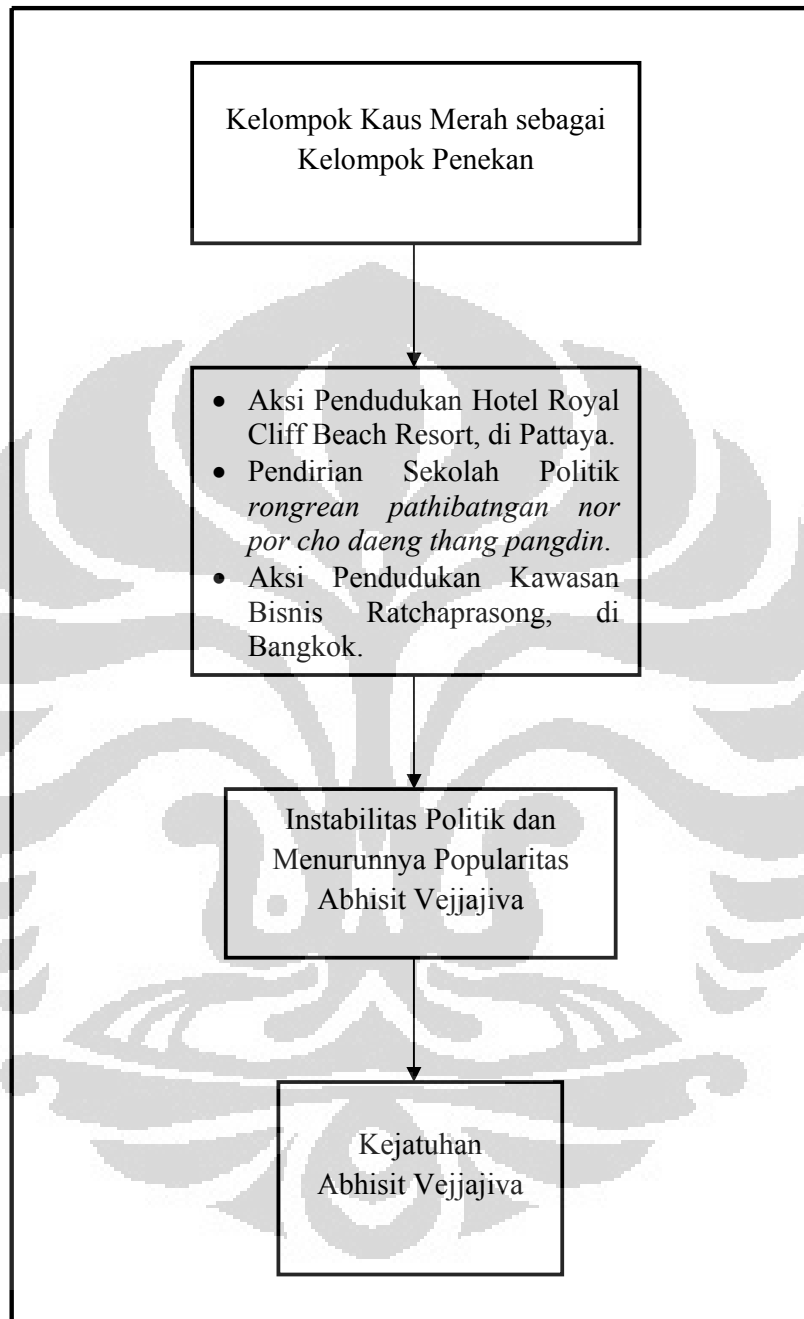
1. Keterwakilan (*representation*), kelompok penekan menyediakan seorang juru bicara kelompok dan kepentingan yang tidak cukup terwakili melalui proses pemilihan atau melalui partai politik. Hal ini terjadi pada sebagian, karena kelompok penekan lebih memfokuskan kepada masalah yang khusus daripada yang umum. Kelompok penekan dapat mengungkapkan pandangan atau kepentingan mereka dan fokus pada sebab tertentu. Kelompok penekan menyediakan alternatif untuk proses perwakilan formal melalui apa yang disebut dengan representasi fungsional.
2. Partisipasi Politik (*political participation*), kelompok penekan merupakan agen yang sangat penting dari partisipasi politik. Kelompok penekan, terutama kelompok-kelompok luar berupaya untuk mempengaruhi dengan memobilisasi dukungan rakyat, seperti petisi, pawai, demonstrasi, dan bentuk-bentuk protes lainnya.
3. Pendidikan (*education*), banyak dari masyarakat yang mengetahui tentang politik melalui kelompok penekan. Kelompok penekan memang pada umumnya bekerja sesuai dengan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran politik. Kelompok penekan sering melakukan penelitian, mengomentari kebijakan

pemerintah, menggunakan akademisi dan ilmuwan bahkan selebriti untuk mendapatkan dukungan.

4. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*), meskipun definisi kelompok penekan bukan pembuat kebijakan, tetapi kelompok penekan dapat mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Kelompok penekan merupakan sumber informasi penting dalam memberikan saran kepada pemerintah.
5. Pelaksanaan Kebijakan (*policy implementation*), kelompok penekan berupaya mendalami isi dari kebijakan publik dengan memainkan perannya dengan menempatkan kebijakan dalam pelaksanaannya.



## 1.6. Alur Berpikir



Dari skema alur berpikir diatas, kelompok Kaus Merah sebagai kelompok penekan pemerintahan Abhisit Vejjajiva di Thailand. Naikaknya Abhisit sebagai PM Thailand mengundang aksi protes dari kelompok pro-Thaksin karena dianggap terpilihnya Abhisit tanpa melalui proses pemilu. Kelompok loyalis ini selalu memberikan tekanan kepada Abhisit agar mundur dari kekuasaan, membubarkan parlemen, dan menggelar pemilu dalam waktu singkat dalam menentukan pemimpin. Berbagai aksi yang dilakukan kelompok Kaus Merah dalam menekan pemerintah Abhisit, seperti aksi pendudukan Hotel Cliff Pattaya Beach Resort di Pattaya, pendirian sekolah politik (dalam bahasa Thai, *rongrean pathibatngan nor por cho daeng thang pangdin*), dan aksi pendudukan kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Aksi-aksi ini mengakibatkan instabilitas politik dan menurunnya popularitas Abhisit, sehingga hal ini berujung pada kejatuhan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand.

#### **1.7. Asumsi**

1. Kelompok Kaus Merah sebagai kelompok penekan yang berusaha menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand.
2. Kelompok Kaus Merah berperan dalam menjatuhkan Abhisit Vejjajiva dengan melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan aksi pendudukan kawasan bisnis Ratchaprasong, di Bangkok.
3. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah mengakibatkan instabilitas politik dan menurunnya popularitas Abhisit yang berujung pada kejatuhan Abhisit Vejjajiva.
4. Instabilitas politik yang diakibatkan oleh kelompok Kaus Merah mempengaruhi kejatuhan Abhisit Vejjajiva di Thailand.



## 1.8. Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan lebih akurat dan terarah dalam strategi penulisan. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif.<sup>32</sup> Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>33</sup> Tujuan penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena sosial yang menyajikan gambaran yang lengkap mengenai *social setting* dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memberikan gambaran secara cermat dan akurat mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>34</sup> Menurut Hadari Nawari metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan baik subjek ataupun objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>35</sup> Hadari juga menambahkan bahwa metode penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>36</sup>

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat penjabaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>37</sup> Rachmat Kriyanto menyebutkan bahwa paradigma

<sup>32</sup> Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman isu, tekstur, dan data mentah, karena data induktifnya lebih menitikberatkan pada pengembangan mendalam dan generalisasi data yang dikumpulkan. Dengan demikian, sifat dari penelitian ini tidak hanya menjabarkan dan memaparkan berbagai kasus mengenai permasalahan yang diangkat, tetapi juga akan melakukan analisa dengan pisau analisis berupa teori yang telah dijabarkan dalam kerangka teori dan kerangka konsep dan tentunya juga relevan dengan isu yang diangkat. W. Laurens Neuman, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach* (Boston: Allyn and Bacon, 1997), hlm. 14.

<sup>33</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

<sup>34</sup> Dr. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 4.

<sup>35</sup> Hadari Nawari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 83.

<sup>36</sup> Hadari Nawari, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 73.

<sup>37</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan IX, 1995). hlm. 18.

kualitatif menekankan pada persoalan kedalaman atau kualitas data bukan banyaknya data atau kuantitas data yang didapat. Ia juga menyatakan bahwa semua riset yang menggunakan paradigma kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.<sup>38</sup>

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Berbagai data sekunder, seperti buku, dan jurnal-jurnal ilmiah, koran, majalah, serta situs-situs internet baik dari dalam dan luar negeri. Data yang diperoleh bertujuan untuk menganalisis landasan berpikir mengenai kelompok penekan, kelompok Kaus Merah di Thailand dan kejatuhan PM Abhisit Vejjajiva.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini merupakan gagasan awal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, dimana memaparkan beberapa tahapan, yang terdiri dari ; Latar Belakang, Perumusan Masalah, Signifikansi Penulisan, Tujuan Penulisan, Kerangka Teori, Alur Berpikir, Asumsi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini akan menjelaskan dari aspek sosio historis kemunculan kelompok Kaus Merah dan naiknya Abhisit sebagai PM Thailand.

Bab 2 Kemunculan Kelompok Kaus Merah dan Naiknya Abhisit Vejjajiva sebagai Perdana Menteri di Thailand. Bab kedua ini akan menjelaskan munculnya kelompok Kaus Merah dari aspek sosio historis. Bab ini juga akan menjelaskan profil Kaus Merah di Thailand. Selanjutnya akan menjelaskan naiknya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand. Dalam bab ini, juga akan dijelaskan tentang terbentuknya konstelasi kekuatan di parlemen setelah kejatuhan Thaksin. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Abhisit yang mengundang reaksi dari kelompok Kaus Merah di Thailand.

Bab 3 Peran Kelompok Kaus Merah dalam Menjatuhkan Abhisit Vejjajiva di Thailand (2008-2011). Bab ketiga ini akan menjelaskan peran kelompok Kaus

---

<sup>38</sup> Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hlm. 29.

Merah dalam melakukan tekanan terhadap pemerintahan Abhisit. Dalam bab ini, akan dijelaskan juga tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah, seperti aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, Kaus Merah mendirikan sekolah politik, dan aksi pendudukan kawasan bisnis Ratchaprasong, di Bangkok. Dalam bab ini juga menjelaskan kejatuhan rezim Abhisit karena tekanan dari kelompok Kaus Merah di Thailand.

Bab 4 Kesimpulan. Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, dimana bagian ini adalah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Kesimpulan yang ditulis merupakan rangkaian dari pembahasan yang dijadikan sebagai hasil analisa penulis mengenai tema yang diangkat, kemudian didukung dengan data-data empiris guna menjelaskan esensi dari penulisan skripsi ini.

Kesimpulan dari skripsi ini berisi tentang peran kelompok Kaus Merah terhadap kejatuhan rezim Abhisit Vejjajiva. Kaus Merah berperan dalam memberikan tekanan kepada pemerintah Abhisit dengan melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan aksi pendudukan kawasan bisnis Ratchaprasong, di Bangkok. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok pro-Thaksin ini menciptakan ketidakstabilan politik di masa pemerintahan Abhisit. Dengan demikian, Kaus Merah sebagai kelompok penekan berpengaruh terhadap kejatuhan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand.

## **BAB 2**

### **KEMUNCULAN KELOMPOK KAUS MERAH DAN NAIKKNYA ABHISIT VEJJAJIVA SEBAGAI PERDANA MENTERI DI THAILAND**

Kudeta militer tahun 2006 yang menggulingkan Thaksin Shinawatra menjadi latar belakang munculnya kelompok Kaus Merah di Thailand. Massa yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah sebagian besar adalah pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra. Mereka menentang kudeta militer tidak berdarah pada September 2006 dan pemerintahan junta militer. Kelompok pro-Thaksin memiliki basis kekuatan massa di beberapa provinsi di Thailand, seperti di Chiang Mai, Chiang Rai, Udon Thani, dan Ubon Ratchathani. Massa yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah berasal dari berbagai profesi, yaitu aktivis pro-demokrasi, aktivis serikat buruh, mantan komunis, dan tentara, serta mereka yang berpenghasilan rendah. Mereka mengekspresikan kekecewaan setelah militer mengambilalih kekuasaan Thaksin secara paksa. Keberhasilan Thaksin dalam bidang ekonomi merupakan indikasi kecintaan rakyat terhadap dirinya, khususnya wilayah Utara dan Timur Laut Thailand. Semasa pemerintahan junta militer, kelompok loyalis ini menggelar aksi protes dan mengecam aksi kudeta atas patronnya.

Pasca-kejatuhan Thaksin instabilitas politik kembali menyelimuti Thailand setelah PPP dibubarkan. DP yang merupakan partai oposisi terbesar di parlemen mengusung nama Abhisit Vejjajiva sebagai PM. Naiknya Abhisit mendapat tekanan dari pendukung Thaksin karena ia terpilih tanpa melalui proses pemilu melainkan hanya menang dalam pemungutan suara di parlemen. Kelompok Kaus Merah melakukan berbagai aksi protes atas terpilihnya Abhisit. Semasa pemerintahan Abhisit, ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, seperti pemberlakuan UU penghinaan terhadap kerajaan (*Lèse Majesté*), UU keadaan darurat (*State of Emergency*), dan UU kejahatan komputer (*Computer Crime*). Kebijakan-kebijakan inilah yang membuat massa pro-Thaksin semakin marah karena dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat di negaranya.

Dalam bab ini, akan menjelaskan kemunculan kelompok Kaus Merah dari aspek sosio historis. Bab ini juga akan menjelaskan profil kelompok Kaus Merah dan dukungannya terhadap Thaksin Shinawatra. Pembahasan berikutnya akan menjelaskan naiknya Abhisit Vejjajiva menjadi PM Thailand bersama partainya DP. Selanjutnya akan menjelaskan terbentuknya konstelasi kekuatan di parlemen setelah kejatuhan Thaksin, dan akan menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah Abhisit yang mengundang aksi protes massa pendukung Thaksin.

### 2.1. Kejatuhan Thaksin Shinawatra dan Munculnya Kelompok Kaus Merah di Thailand

Perkembangan sosial-politik di Thailand semakin kompleks pasca militer meng kudeta Thaksin Shinawatra pada September 2006. Militer menganggap bahwa keberadaan Thaksin sebagai ancaman bagi kedaulatan negara karena dengan berbagai sikap dan kebijakannya mengakibatkan krisis dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) semakin menjamur di tingkat eksekutif maupun legislatif Thailand. Dengan demikian, militer yang didukung oleh Raja Bhumibol akhirnya mengambil alih secara paksa kekuasaan Thaksin ketika ia sedang menghadiri sidang umum PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) di New York, Amerika Serikat.<sup>39</sup> Kudeta terhadap Thaksin mendapat respon dari rakyat miskin di pedesaan wilayah Utara dan Timur Laut Thailand dengan menggelar aksi protes mengecam aksi kudeta. Mereka tergabung dalam suatu wadah perjuangan demokrasi yaitu kelompok Kaus Merah. Perjuangan rakyat (*prai*) dalam melawan elit (*ammart*) merupakan akar krisis politik yang menyebabkan krisis berkepanjangan pasca kudeta 2006 hingga kejatuhan rezim Abhisit di Thailand.

Kemunculan kelompok pro-demokrasi pasca kudeta merupakan bentuk tanggapan dari pendukung Thaksin dalam menentang kudeta militer tidak berdarah pada September 2006. Kelompok ini dibentuk pertama kali pada tahun

<sup>39</sup> Sri Issundari, *Latar Belakang Kudeta Militer Thailand pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra*, LIPI Vol. 12 No. 4, Desember 2008, hlm. 203-207, diunduh dari : <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12408203211.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2012, pada pukul 20.20 WIB.

2007 yang menentang aksi kudeta dan pembentukan Konstitusi 2007 di bawah rezim junta militer. Masyarakat Thailand yang menginginkan terciptanya proses demokrasi yang mapan, justru kali ini mengalami kemunduran setelah militer mengkudeta Thaksin.

Perseteraan antara pihak sipil dan militer diindikasikan sebagai latar belakang kudeta militer pada September 2006 yang menggulingkan Thaksin dari kekuasaan. Militer menganggap bahwa Thaksin yang populer dengan kebijakan-kebijakan populisnya telah memecah belah masyarakat Thailand. Di sisi lain, sikap dan kebijakan yang dijalankan Thaksin menyebabkan KKN yang semakin menjamur semasa pemerintahannya. Pihak militer pada awalnya meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak akan terjadi kudeta dalam menggulingkan Thaksin. Namun, pada menjelang tengah malam militer dengan persenjataan lengkap mengepung kota Bangkok menggunakan tank-tank yang bersandar di setiap sudut jalan ibukota.<sup>40</sup> Militer menganggap bahwa Thaksin telah gagal dalam mengelola negara terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Walaupun, semasa pemerintahannya ia telah berhasil mengambil hati rakyat miskin di pedesaan, khususnya di wilayah Utara dan Timur Laut Thailand yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Hal inilah yang menjadi faktor kecintaan rakyat miskin terhadap Thaksin dengan beberapa kebijakannya yang pro-rakyat.

Kembalinya militer dalam pentas politik Thailand jelas menggambarkan kemunduran demokrasi di Thailand. Di sisi lain, militer sendiri sedang mengupayakan reformasi di bidang militer, agar lebih profesional atau tidak mencampuri koridor politik. Namun, hal ini tidak terealisasi dengan baik, militer mencoba menggunakan kekuatannya mengambil paksa kepemimpinan Thaksin, yakni melalui kudeta tahun 2006. Kudeta adalah salah bentuk dari intervensi militer dalam politik. Dalam kaitannya dalam pelaksanaan demokrasi, kudeta merupakan bukti kemunduran perkembangan demokrasi itu sendiri. Hal ini sangat menarik bagi kalangan pemerhati demokrasi, karena kudeta sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi. Giles Ji Ungpakorn menyatakan

---

<sup>40</sup> Michael H. Nelson, *Thailand's "Well-Intentioned" Coup of September 19, 2006*, Eastasia.at, Vol. 6 No. 1, Juni 2007, hlm. 1-2.

bahwa demokrasi di negara ini tidak akan hidup, jika negara ini masih dikuasai oleh kelompok yang memilih jalan kudeta.<sup>41</sup>

Pecahnya kudeta militer tahun 2006 mengakibatkan runtuhnya rezim Thaksin. Hal ini berdampak langsung pada situasi dan kondisi perpolitikan Thailand pasca kudeta militer tahun 2006. Lidya Christin Sinaga, peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyatakan bahwa kudeta terhadap Thaksin merupakan latar belakang munculnya kelompok Kaus Merah di Thailand.<sup>42</sup> Mereka hadir sebagai kelompok loyalis terhadap Thaksin Shiwatra yang telah berhasil mengambil hati rakyat di pedesaan maupun di perkotaan. Mereka hadir sebagai kelompok pro-demokrasi yang mengecam kudeta sebagai salah satu cara militer untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan yang sah dipilih oleh rakyat. Selama tahun (2006-2007), kelompok ini semakin melancarkan aksinya melawan pemerintahan di bawah rezim junta militer. Kelompok Kaus Merah merupakan aliansi dari kelompok-kelompok Tani dan rakyat miskin di pedesaan yang berasal dari Thailand bagian Utara dan Timur Laut, dimana mereka merindukan kebijakan-kebijakan populis Thaksin.

Semasa pemerintahan Thaksin, keberhasilannya melalui program-program populis tidak berjalan mulus dengan kehadiran kalangan elite oposisi dan kelas menengah Bangkok termasuk militer. Kebijakan populis Thaksin melahirkan pro dan kontra di masyarakat Thailand, ia dituduh melakukan *money politics* melalui kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat miskin di pedesaan dan petani untuk mengamankan kekuasaannya. Kelas Menengah Bangkok merasa terdiskriminasi dengan kebijakan populis tersebut, karena Thaksin mengabaikan kepentingan mereka yang merupakan bagian dari masyarakat Thailand juga.

Beberapa kebijakan Thaksin dianggap merugikan masyarakat elite, diantaranya pemberian dana kepada penduduk pedesaan, moratorium utang selama tiga tahun bagi petani, penyaluran kredit murah kepada petani, penduduk

---

<sup>41</sup> Giles Ji Ungkaporn, *A Coup For the Rich*, *Thailand's Political Crisis* (Thailand: National Library of Thailand Cataloging, 2007).

<sup>42</sup> Lidya Christin Sinaga, "Jalan Panjang Demokrasi di Thailand", diunduh dari : <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand->, diakses pada tanggal 3 Maret 2012, pada pukul 22.00 WIB.

pedesaan dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Selain itu, pemberian subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik, program pelayanan kesehatan murah, intensif untuk pengembangan UKM di pedesaan, mendorong privatisasi badan-badan usaha milik negara dan menggalakkan mega proyek, termasuk investasi sebesar 50 miliar Bath untuk infrastruktur umum, seperti jalan raya dan pembangunan bandara internasional baru.

Kebijakan-kebijakan populis Thaksin menjadi kontroversi, dimana perekonomian negara mengalami inflasi, defisit, dan pertumbuhan ekonomi yang awalnya melonjak naik dan akhirnya terpuruk. Hal ini membuat pemerintah menghapuskan subsidi BBM. Gaya kepemimpinan yang otoriter dan sewenang-wenang mengundang reaksi dari oposisi, khususnya kelas menengah perkotaan, dan didukung militer untuk mencegah keadaan agar tidak semakin terpuruk. Hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin. Dalam bidang politik, kontrovesi kebijakan represif Thaksin terhadap masyarakat di wilayah Thailand Selatan. Kebijakan ini mengundang reaksi dan mendapat tekanan dari masyarakat, upaya yang diambil Thaksin dalam mengambil tindakan represif untuk menangani pemberontak kelompok minoritas muslim di Thailand Selatan. Pada masa ini, rekor pelanggaran HAM sangat terburuk di bawah rezim Thaksin. Pada tanggal 28 April sampai bulan Oktober 2004 tercatat sebanyak 108 warga muslim lokal meninggal dunia. Konflik antara pemerintah pusat dengan wilayah selatan Thailand, sampai bulan Januari 2006 tercatat bahwa total jumlah korban mencapai 1.700 orang.<sup>43</sup>

Masyarakat muslim Thai sejak lama mengalami penderitaan tertindas, termarginalisasi dari kehidupan perkotaan, serta mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat. Wilayah Thailand Selatan yang didominasi oleh masyarakat muslim, antara lain provinsi Yala, Narathiwat, Pattani, dan Songkhla.<sup>44</sup> Dalam bidang pembangunan ekonomi, keempat wilayah ini sangat terbelakang dibandingkan dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu, wilayah ini

---

<sup>43</sup> "Rusuh di Thailand Selatan, Enam Orang Tewas", diunduh dari : <http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2006/10/18/2003/Rusuh-di-Thailand-Selatan.-Enam-Orang-Tewas>, diakses pada tanggal 5 Maret 2012, pada pukul 23.00 WIB.

<sup>44</sup> Haviva Mahani Putri, *Integrasi Masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan : Studi Kasus SBPAC dan CPM43*, Skripsi Sarjana (Depok: FISIP UI, 2008), hlm. 2-5.



sangat erat kaitannya dengan gerakan separatisme di Thailand. Setelah serangkaian serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh warga muslim dalam rangka untuk memisahkan diri dari bagian negara Thailand pada akhir 2004, maka pemerintah pusat memberlakukan status darurat di wilayah tersebut.

Ketidaksepahaman antara Thaksin dengan militer terjadi, ketika militer didukung untuk melakukan tindakan represif dalam upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Di satu sisi, Thaksin memberikan kekebalan hukum kepada militer yang diterjunkan yang berjumlah 40.000 prajurit untuk melakukan penangkapan tanpa melalui proses pengadilan, selama lebih dari 30 hari.<sup>45</sup> Dalam berbagai kebijakan represifnya, Thaksin juga membatasi kebebasan individu di wilayah tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan militer, dimana militer ingin melakukan pendekatan persuasif dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Kebijakan represif tersebut justru berpotensi kudeta militer terhadap dirinya.

Selain dalam masalah anti-narkoba, ketidakcakapan juga terjadi pada kebijakan Thaksin dalam menghadapi konflik komunitas muslim di Thailand Selatan. Keputusan Thaksin untuk menghapuskan institusi CPM 43 (*Civil Police Military 43*) dan SBPAC (*Southern Border Province Administration Center*) dengan anggapan bahwa keadaan Thailand Selatan telah kondusif ternyata salah. Aksi separatisme ternyata masih marak terjadi. Namun kemudian, Thaksin membentuk SBP-BC (*Southern Border Peace Building Command*) dengan tugas yang kurang lebih sama dengan CPM 43 dan SBPAC.<sup>46</sup> Perbedaannya, dalam menangani aksi separatistis dari masyarakat muslim di Thailand, SBP-BC cenderung menggunakan cara-cara kekerasan. Langkah operasi militer yang dilakukan Thaksin menuai banyak kritikan dari masyarakat Thailand Selatan, pihak militer dan kerajaan. Meskipun banyak mendapat kritikan, Thaksin kemudian memutuskan untuk menerapkan UU (Undang-Undang) Darurat Militer pada tahun 2004 yang membuat keadaan semakin memanas.

---

<sup>45</sup> Emma Avery Chanlett, *Thailand: Background and US Relation*, Congressional Research Service, 2006, hlm. 3.

<sup>46</sup> Haviva Mahani Putri, *Op. Cit.*, hlm. 84-90.

Dengan melihat sikap dan kebijakan Thaksin di atas, maka inilah yang menjadi faktor pecahnya kudeta militer pada September 2006. Pemerintah Junta di bawah Jenderal Sonthi Boonyaratglin sebagai pemimpin Junta Militer yang kemudian mendaulatkan dirinya menjadi PM Thailand sementara setelah merebut kekuasaan Thaksin secara paksa. Sonthi berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat setelah Dewan Pembaruan Administrasi memilih PM baru. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer pada tahun 2006 yang menggulingkan Thaksin pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Thaksin selama ia menjabat sebagai PM Thailand (2001-2006). Pecahnya kudeta militer 2006 terjadi karena posisi Thaksin yang populer di kalangan masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan sangat sulit dijatuhkan.

### **2.1.1. Dukungan Politik terhadap Thaksin Shinawatra**

Pada tahun 2001, partai Thai Cinta Thai (*Thai Rak Thai*/TRT) memenangkan pemilihan umum (pemilu) di Thailand, sosok Thaksin yang mengendarai partai TRT praktis mendominasi perpolitikan di Thailand pada abad ke 21. Pada masa itu, ia mencetuskan beberapa ide atau gagasan yang fenomenal. Sebenarnya, Thailand pada tahun 2001 mendapatkan hembusan ‘angin segar’, dimana ketika saat itu dilangsungkan pemilu di bawah Konstitusi Rakyat 1997. Pada pemilu tahun 2001 merupakan titik awal dari upaya untuk terciptanya demokratisasi yang harmonis di Thailand. Melalui proses pemilu, Thaksin yang merupakan seorang konglomerat media dan ia terpilih sebagai PM melalui pemilu pada tahun 2001. Bersama partainya, Thaksin yang mengendarai TRT dan berhasil menjalankan kebijakan-kebijakan populis. Ia mendapat dukungan besar dari masyarakat miskin Thailand, khususnya kaum tani dan kaum miskin, yang berada di Thailand bagian Utara dan Timur Laut.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> “Additional Information Thai Government vs. UDD (Red Shirts): The UCDP Take on the Violence in Bangkok During the Red Shirt Protests of April and May 2010”, hlm. 1-6, diunduh dari : [http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/info/THI\\_1.pdf](http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/info/THI_1.pdf), diakses pada tanggal 15 Maret 2012, pada pukul 22.00 WIB.

Thaksin lahir pada bulan Juli 1949 di wilayah utara Chiang Mai. Thaksin memulai karirnya sebagai perwira polisi, dan karirnya meningkat ketika ia mendapatkan beberapa penghargaan dibidangnya. Ia pensiun dari dunia kepolisian kemudian mendirikan perusahaan bisnis dalam bidang komunikasi yang bernama *Shin Corp.*<sup>48</sup> Pada masa itu, perusahaan yang dipimpin Thaksin tumbuh dengan pesat dan menjadikan Thaksin sebagai orang terkaya di Thailand. Hal ini yang menjadikannya terjun ke dunia politik setelah mengalami kesuksesan pada bisnisnya. Thaksin yang memulai karir politiknya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1994. Kesuksesan Thaksin membuat dirinya mendirikan partai politik yang bernama TRT, tiga tahun kemudian partainya mengikuti pemilu pertama dibawah Konstitusi Rakyat pada tahun 2001.

Pemilu yang diadakan pada tahun 2001 merupakan titik awal kebangkitan proses demokratisasi di Thailand, dimana sejak tahun 1990-an pergantian kekuasaan selalu diwarnai dengan kudeta militer. Pemilu ini merupakan pemilu pertama sejak diberlakukannya Konstitusi Rakyat 1997. Pemilu yang berjalan demokratis yang mengikutsertakan 37 Partai Politik. Dari sekian banyak partai politik yang ikut merayakan pesta demokrasi di Thailand, hanya tersedia 500 kursi di parlemen. Pada pemilu 2001 TRT berhasil meraih 248 kursi di parlemen. Pada pemilu berikutnya pada tahun 2005, TRT menang mutlak dengan meraih 337 kursi. Tabel berikut adalah perolehan suara pemilu tahun 2001 di Thailand.

---

<sup>48</sup> John Aglionby, "Profile : Thaksin Shinawatra", diunduh dari : <http://www.guardian.co.uk/world/2006/sep/19/thailand1>, pada tanggal 13 Maret 2012, pada pukul 20.00 WIB.

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Pemilihan Umum Tahun 2001 di Thailand.**

<b>Party</b>	<b>Kursi</b>
<b>Thai Rak Thai</b>	<b>248</b>
Democrat	128
New Aspiration	26
Chart Pattana	29
Seritham	14
Chart Thai	41
Ratsadom	2
Social Action	1
Thin Thai	1
Mahacon	-

Sumber : *National Election Commission* (2001: 161, 381-464)

Dari tabel 2.1. di atas, dapat dilihat kemenangan TRT dalam pemilu 2001 berhasil meraih 248 kursi mengungguli DP yang hanya meraih 128 kursi. Kemenangan pertama ini membawa Thaksin ke puncak kekuasaan di Thailand. Namun, kemenangan Thaksin saat itu bersamaan dengan krisis finansial Asia. Pemerintah Thaksin berupaya keluar dari krisis tersebut dengan menggunakan kekayaannya dalam menggairahkan perekonomian di pedesaan. Hal tersebut juga meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan pasca krisis finansial dan mengeluarkan Thailand dari ketergantungan pinjaman dana yang berasal dari IMF (*International Monetary Fund*). Hal ini membuktikan bahwa Thailand merupakan salah satu negara yang cepat keluar dari krisis tersebut. Thaksin menjadi populer karena berbagai kebijakan yang pro-rakyat. Hal ini ditandai bahwa Thailand dapat memenuhi permintaan di dalam negeri serta mampu memulihkan perekonomian mereka.

Sosok Thaksin praktis mendominasi perpolitikan Thailand pada abad ke-21 ini, dimana ia mencetuskan beberapa ide-ide yang fenomenal yang sebagian besar berlandaskan kepada pendekatan populis dalam

kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, Thaksin mewakili sebagian pemimpin Thailand yang menantang dominasi *nexus* (politisi, birokrat, dan militer) yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Thailand sejak tahun 1932. Di masa-masa awal pemerintahannya, kebijakan-kebijakan populis Thaksin ini cukup membawa dampak terhadap pemulihan dari krisis ekonomi 1997 - 1998 yang melanda Asia Tenggara, khususnya Thailand. Kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi ini biasa dikenal dengan '*Thaksinomics*' itu dapat meyakinkan kepada banyak pihak bahwa siklus perkonomian Thailand memasuki *boom* kembali. Perekonomian Thailand bergerak secara dinamis yang berorientasi pada penguatan sektor-sektor ekonomi rakyat tidak terlepas dari 'suntikan' program-program populis Thaksin.<sup>49</sup>

Dari program-program populis yang dijalankan oleh pemerintah Thaksin di atas merupakan faktor kelompok loyalis terhadap dirinya. Masyarakat di pedesaan, sejak dasawarsa sebelumnya hanya dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi. Pada masa rezim Thaksin, rakyat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan sangat merasakan dampak yang signifikan atas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini yang merupakan faktor 'kecintaan' rakyat miskin kepada sosok seorang Thaksin. Rakyat menganggap bahwa Thaksin merupakan sosok pemimpin yang memikirkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat menengah-bawah.

Popularitas Thaksin semakin meningkat melalui kebijakan-kebijakan populisnya tersebut dan prestasi tersebut dapat dikatakan berhasil dan sangat berpengaruh bagi wilayah pedesaan. Nama Thaksin sangat dikenal bagi kaum petani dan masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Menurut mereka, Thaksin merupakan pemimpin Thailand pertama yang turun sampai ke pelosok desa untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan jutaan penduduk yang termarginalisasikan. Dibandingkan

---

<sup>49</sup> Robert Looney, *Thaksinomics A New Asian Paradigm?*, diunduh dari : [http://relooney.fatcow.com/Rel\\_JSPES\\_04.pdf](http://relooney.fatcow.com/Rel_JSPES_04.pdf), diakses pada tanggal 7 Januari 2012, pada pukul 23.30 WIB.

dengan pemimpin sebelumnya, Thaksin mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat bawah. Semasa rezim Thaksin, rakyat miskin baik yang tersebar di pedesaan maupun di perkotaan sangat merasakan dampak yang signifikan atas implementasi dari program-program yang ia cetuskan. Hal ini yang merupakan faktor ‘kecintaan’ rakyat miskin kepada Thaksin. Rakyat menganggap bahwa Thaksin merupakan sosok pemimpin yang memikirkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat menengah-bawah.<sup>50</sup>

### 2.1.2. Profil Kelompok Kaus Merah

Massa yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah adalah pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra yang kudeta pada September 2006. Awalnya mereka menentang kudeta militer tahun 2006 dan pembentukan Konstitusi 2007, yang terdiri dari aliansi petani dan rakyat miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Kondisi politik semakin stabil setelah pemerintah junta militer mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand yang ditandai dengan diselenggarakannya pemilu pada 2007. Massa yang menentang kudeta militer dan pemerintah junta mengakhiri aksinya setelah PPP memenangkan pemilu tersebut. Ketegangan politik kembali menerpa perpolitikan nasional Thailand setelah PPP dibubarkan oleh CCT.<sup>51</sup> Abhisit bersama partainya DP yang didukung oleh partai lainnya berhasil membentuk koalisi baru untuk mengambil alih kekuasaan. Hal ini mendapat respon dari kelompok Kaus Merah yang sebagian besar anggotanya pendukung mantan PM Thaksin. Berbagai aksi menekan pemerintah Abhisit agar mundur dari jabatannya semakin gencar dilakukan oleh kelompok loyalis ini, karena dianggap terpilihnya Abhisit tidak melalui proses pemilu.

---

<sup>50</sup> Giles Ji Ungpakorn, *Op. Cit.*, hlm. 20-22..

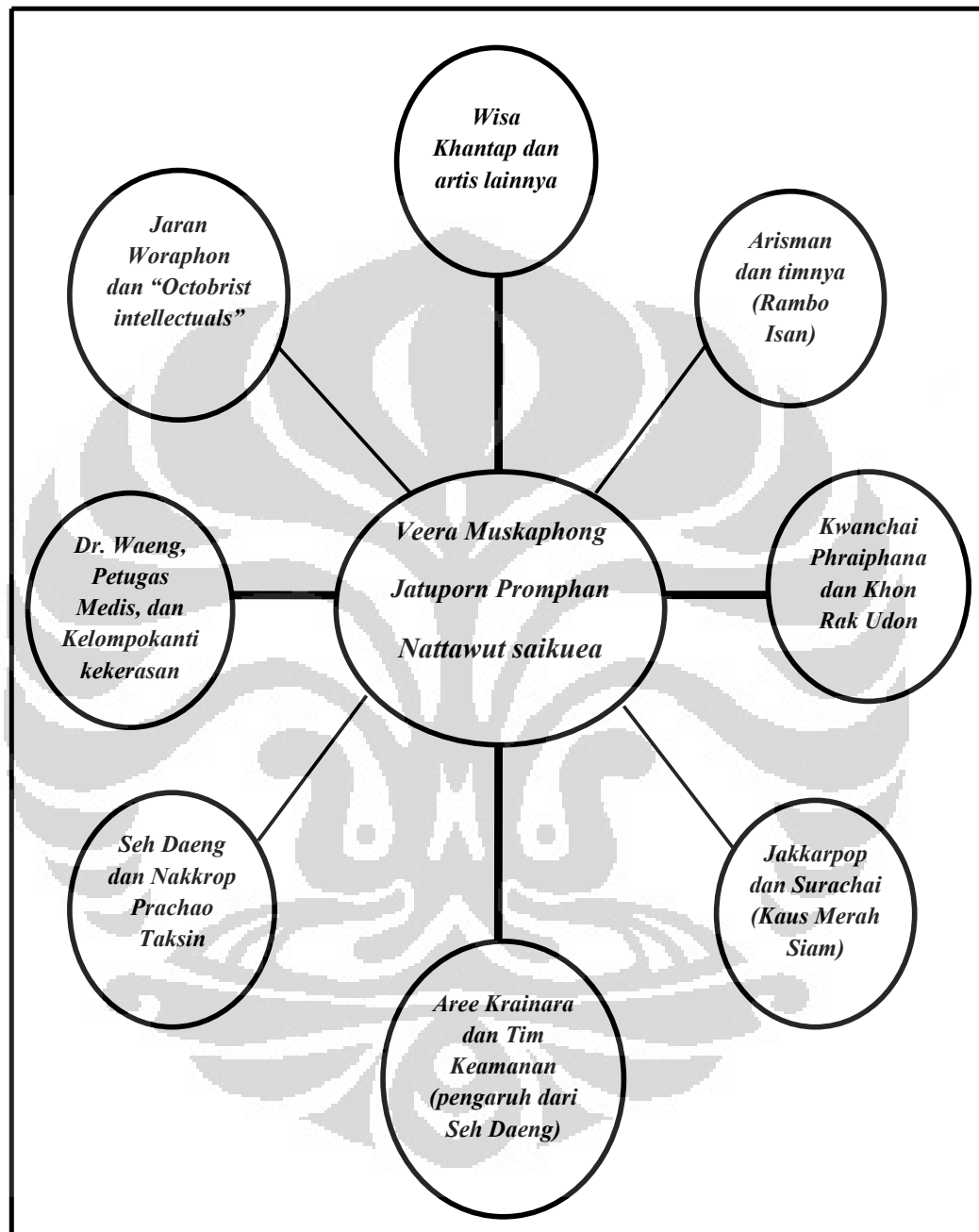
<sup>51</sup> “Pemerintah Thailand Dibubarkan”, diunduh dari : <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/08/12/03/17958-pemerintah-thailand-dibubarkan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2012, pada pukul 19.00 WIB.

Massa yang awalnya hanya aliansi petani dan rakyat miskin di pedesaan, kali ini mereka mendapatkan dukungan dari berbagai elemen di masyarakat, seperti pekerja yang berpenghasilan rendah, aktivis pro-demokrasi, aktivis serikat buruh, mantan komunis, dan tentara yang membelot dari pemerintah. Mereka berasal dari wilayah Utara dan Timur Laut Thailand, khususnya di provinsi Chiang Mai, Chiang Rai, Udon Thani, Khon Kaen, dan Ubon Ratchathani. Sedikitnya terdapat 320 desa di provinsi Udon Thani dan Khon Kaen dijuluki sebagai “*Red Shirt Villages*”.<sup>52</sup> Daerah ini merupakan basis terbesar dari kelompok Kaus Merah, dimana semasa pemerintahan Thaksin wilayah ini sangat merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan populis Thaksin. Massa yang menggunakan atribut berwarna merah tersebut sering dianggap sebagai makhluk pengikut Thaksin Shinawatra. Sejak terpilihnya Abhisit Vejjajiva, kelompok ini sering menggelar aksi protes yang menuntut agar Abhisit mengundurkan diri dari kekuasaan dan membubarkan parlemen, serta menggelar pemilu dalam waktu singkat.

Dalam sebuah kelompok, sosok pemimpin menjadi aktor utama dalam menggalang sebuah kekuatan massa. Pemimpin kelompok Kaus Merah yang menonjol, diantaranya adalah Veera Muskaphong, Jatuporn Promphan, dan Nattawut Saikuea. Mereka merupakan sosok pemimpin yang paling menonjol sejak awal kelompok loyalis ini menggelar aksi protes. Perpecahan ditubuh kelompok ini tidak menyurutkan semangat demokrasi para pendukungnya. Gambar 2.1. di bawah ini merupakan pemimpin Kaus Merah dan faksi-faksi yang ada di tubuh Kaus Merah.

<sup>52</sup> Jason Szep & Ambika Ahuja, “In Thailand’s Red Shirt Villages, Defiance Ahead of Elections”, diunduh dari : <http://www.reuters.com/article/2011/06/07/us-thailandelection-idUSTRE75614T20110607>, diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pada pukul 20.00 WIB.

**Gambar 2.1.**  
**Pemimpin dan Faksi-faksi Kaus Merah di Thailand**



Sumber : Naruemon Thabchumpon and Duncan McCargo, *Urbanized Villagers in the 2010 Thai Red Shirt Protests: Not Just Poor Farmers?*, Asian Survey, Vol. 51, Number 6, University of California, 2011, hlm. 997-1.000.



Dari gambar 2.1. diatas dapat dilihat pemimpin kelompok Kaus Merah dan faksi-faksi yang terpecah di dalam tubuh Kaus Merah. Kepemimpinan tertinggi berada di tangan Veera Muskaphong, Jatuporn Promphan, dan Nattawut Saikuea. Perpecahan di tubuh Kaus Merah tidak menyurutkan para anggotanya dalam bergabung kedalam kelompok yang menggunakan atribut berwarna merah tersebut. Kelompok Kaus Merah sendiri terpecah menjadi dua faksi, kelompok Kaus Merah moderat dan Kaus Merah Siam garis keras. Pemimpin kelompok Kaus Merah yang paling menonjol, yaitu :

1. Veera Muskaphong adalah politisi senior; mantan sekretaris umum DP, dan mantan Menteri Dalam Negeri tahun 1980-an.
2. Jatuporn Promphan adalah anggota parlemen dari PTP.
3. Nattawut Saikuea adalah mantan juru bicara PM Somchai tahun 2008, anggota parlemen dari PTP, dan Wakkil Menteri Pertanian di kabinet Yingluck Shinawatra Jilid 2.

Kelompok Kaus Merah sebagai kelompok yang memiliki basis terbesar di wilayah Utara dan Timu Laut Thailand, akan tetapi ketiga pemimpin Kaus Merah (Veera Muskaphong, Jatuporn Promphan, dan Nattawut Saikuea) berasal dari Selatan. Berbeda dengan para politisi dan beberapa tokoh terkemuka lainnya, seperti Jaran Dithapichai adalah seorang dosen di Rangsit University, Waeng Tojirakan adalah dokter medis dan mantan pemimpin gerakan pro-demokrasi tahun 1992, Wisa Khantap adalah seorang penyanyi, artis, dan aktivis politik, Woraphon Phrommikabut adalah dosen di Thammasat University. Faksi lain yang moderat adalah Arisman Phongruangrong serorang artis, penyanyi, dan aktivis gerakan Mei 1992. Kwanchai Phraiphana adalah penyiar radio komunitas. Nakorn Ratchasima atau biasa dipanggil Khorat, Suphorn Atthawong alias Rambo Isan, dan Yosawarit Chooklom.

Kelompok garis keras biasa dikenal dengan Kaus Merah Siam yang cenderung tidak ingin bernegosiasi dengan pemerintah, karena mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Thaksin selama berada

dipengasingannya. Kelompok ini dipimpin oleh Surachai Danatthananusorn adalah mantan anggota CPT (*Communist Party of Thailand*). Selain itu, terdapat Seh Daeng merupakan julukan bagi seorang perwira tinggi militer yang bernama Jenderal Khattiya Sawasdipol. Selama protes berlangsung di kawasan Ratchaprasong, ia membantu dalam menjaga keamanan di sekitar perkemahan kelompok Kaus Merah.

Pemimpin Kaus Merah, Veera, Jatuporn, dan Nattawut merupakan pemimpin yang paling menonjol selama aksi protes karena diantara mereka saat itu masih menjabat sebagai anggota parlemen dari PTP. Kelompok ini semakin kuat karena ada keterwakilan mereka di parlemen. Kurangnya akuntabilitas dan garis komando yang jelas dari para pemimpin Kaus Merah, aktor lain dibalik Kaus Merah dapat merusak efektifitas sebuah gerakan. Thida Thawornset, istri Dr. Waeng menyatakan bahwa gerakan yang awalnya berjalan dengan tertib tiba-tiba terjadi kekerasan dari kelompok garis keras, karena gerakan ini merefleksikan keberanian dan kejantanan bagi mereka. Akibatnya, konsentrasi para pemimpin Kaus Merah terpecah ketika pemerintah menawarkan negosiasi damai untuk mengakhiri konflik pada Maret-Mei 2010. Kelompok Kaus Merah moderat menyetujui tawaran negosiasi tersebut. Namun, hal ini mendapat kritikan tajam oleh kubu garis keras yang menginginkan tumbang rezim Abhisit yang kental dengan campur tangan militer. Sosok Thaksin merupakan sosok sentral dari berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah di Thailand.

## **2.2. Terpilihnya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand**

Krisis politik kembali menyelimuti Thailand, setelah CCT membubarkan partai PPP pada akhir 2008, karena terbukti melakukan kecurangan pada pemilu 2007. Kekosongan politik pasca dibubarkannya partai terbesar di parlemen, maka hal ini memaksa pemerintah menggelar pemilu parlemen ketiga. DP yang merupakan partai oposisi terbesar di parlemen berhasil mengambil alih kekuasaan

setelah berkoalisi dengan partai lainnya. Naiknya Abhisit ke puncak kekuasaan mendapat respon dari kelompok Kaus Merah yang menentang kehadiran Abhisit tanpa melalui proses pemilu nasional, melainkan hanya dilakukan di parlemen. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Kaus Merah untuk menggelar aksi protes melawan pemerintahan yang tidak demokratis. Kemunculan gerakan pro-demokrasi kelompok Kaus Merah berkorelasi dengan kondisi sosial dan ekonomi saat itu.

Kesenjangan ekonomi antara kehidupan di kota Bangkok dan sekitarnya dengan daerah di pedesaan terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Rakyat miskin yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah merasa ketakutan jika pemerintahan dikuasai oleh kubu DP. Kekhawatiran mereka muncul ketika pemerintah tidak akan menjalankan kebijakan populis seperti Thaksin. Sebagian besar dari mereka yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah adalah rakyat miskin yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Dari sinilah, terlihat bahwa terpilihnya Abhisit akan terus mendapatkan tekanan dari kelompok Kaus Merah.

Dalam pembahasan selanjutnya akan menjelaskan profil politik Abhisit Vejjajiva serta suksesi Abhisit terpilih menjadi PM Thailand dan terbentuknya konstelasi kekuatan di parlemen setelah kejatuhan Thaksin Shinawatra di Thailand. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Abhisit yang mengundang aksi kelompok pro-demokrasi di Thailand.

### **2.2.1. Konstelasi Politik di Parlemen Pasca Kejatuhan PM Thaksin Shinawatra**

Pasca kudeta dan junta militer, akhirnya Thailand menggelar pemilu parlemen pertama atas restu Raja Bhumibol Adulyadej pada tanggal 23 Desember 2007. Pemerintahan junta militer membuktikan janjinya akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand setelah terbentuknya pemerintahan sementara dibawah kepemimpinan Surayud Chulanont. Dalam menghadapi pemilu 2007, masing-masing kandidat Samak Sundaravej dan Abhisit Vejjajiva mempromosikan visi dan misi mereka jika terpilih menjadi PM Thailand. Pesta demokrasi digelar pasca

pembubaran TRT yang bertransformasi menjadi PPP. Tabel berikut adalah perolehan suara pada pemilu parlemen 2007 di Thailand.

**Tabel 2.2.**  
**Hasil Pemilihan Umum tahun 2007 di Thailand**

<b>Partai</b>	<b>Kursi</b>
People's Power Party	233
Democrat Party	164
Chart Thai Party (Thai Nation Party)	34
Puea Paendin Party (The Motherland Party)	24
Ruamjaithai Chartpatana Party (Thais United National Development Party)	11
Matchima Thipataya Party (Neutral Democratic Party)	9
Pracha Raj Party (Royal People Party)	5
<b>TOTAL</b>	<b>480</b>

Sumber : Pasuk Phongpaichit & Chris Backer, *The Mask-play Election: General, Politicians, and Voters at Thailand's 2007 Pool*, ARI (Asia Research Institute), Working Paper Series No. 144, hlm. 24-31.

Dari tabel 2.2. diatas, dapat dilihat perolehan suara pemilu parlemen Thailand tahun 2007. DP mengalami banyak kenaikan kursi di parlemen, pada pemilu sebelumnya tahun 2005 hanya mendapatkan 96 kursi. Walaupun DP kalah dalam pertarungan melawan Samak Sundaravej, hal ini membuktikan bahwa popularitas Abhisit lebih populer dibandingkan dengan Banyat (ketua DP sebelumnya). Jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2005, DP mengalami banyak kenaikan kerana pada waktu itu hanya berhasil meraih 96 kursi, sedangkan TRT mendapatkan 376 kursi.

Kekalahan Abhisit dalam pemilu 2007 merupakan kekalahan pertama selama ia menjabat sebagai ketua DP. TRT yang bertransformasi menjadi PPP mengadopsi kebijakan populis Thaksin. Hasil ini membuktikan bahwa walaupun percahnya kudeta 2006 sebagai upaya menyingkirkan Thaksin dari perpolitikn Thailand. Namun, rakyat tetap menganggap citra PPP melekat dengan kebijakan Thaksin semasa pemerinthannya. Kepemimpinan Samak tidak hanya bertahan kurang dari

satu tahun. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintahan Somchai hanya bertahan tiga bulan. Tekanan dari kelompok Kaus Kuning dengan melakukan okupasi dua bandara terbesar di Thailand, yaitu bandara Suvarnabhumi dan Don Muang, karena menganggap Samak dan Somchai merupakan kepanjangan tangan Thaksin Shinawatra.

Instabilitas politik kembali menyelimuti Thailand setelah PPP dibubarkan oleh CCT. DP sebagai partai oposisi terbesar di parlemen yang berpeluang dalam merebut kekuasaan pasca dibubarkannya PPP tahun 2008. Abhisit Vejjajiva merupakan calon terkuat dalam bursa pencalonan PM Thailand ke-27 yang diusung oleh DP. Abhisit bersama partainya kemudian membentuk koalisi baru dengan menggalang kekuatan politik bersama partai-partai lainnya di parlemen.<sup>53</sup> Pasca dibubarkannya PPP karena terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu 2007, maka mantan anggota dari PPP membelot ke BJT untuk memperpanjang karir politiknya. Mereka yang membelot ke BJT berasal dari faksi *friends of Newin Group*<sup>54</sup> dari PPP yang dipimpin oleh Newin Chidchob.<sup>55</sup> Selain itu, DP juga berhasil menarik partai lainnya untuk bergabung dengan koalisi baru tersebut, diantaranya CTP (*Chart Thai Pattana*), RJT (*Ruam Jai Thai Party*), SAP (*Social Action Party*) dan beberapa anggota parlemen dari partai PP (*Puea Pandin*). Tabel berikut ini adalah konstelasi kekuatan partai di parlemen pasca kejatuhan Thaksin Shinawatra.

<sup>53</sup> Chairat Charoensin-o-larn, *Thailand in 2009: Unusual Politics Become Usual*, Southeast Asian Affair 2010, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 303-331.

<sup>54</sup> *Friends of Newin Group* merupakan faksi yang berkoalisi dengan PPP sebelum partai ini dibubarkan, anggotanya antara lain : Newin Chidchob, Somsak Thesuthin, Sonthaya Khunplome, Pinij Charusmbat, Preecha Laohapongchana, Suchart Tancharoen, Sanoh Thienthong, Suwat Lipatapanlop, Suriya Juengrungrungking, dan Anutin Chanweerakul. Diunduh dari : <http://www.nationmultimedia.com/home/search/adsearch.php?keyword=+Newin+Chidchob+>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012, pada pukul 21.00 WIB.

<sup>55</sup> Newin Chidchob adalah mantan anggota parlemen dari PPP dan mantan wakil menteri pertanian dan koperasi pertanian (2002-2005) dalam kabinet Thaksin Shinawatra dari TRT. Krisis politik tahun 2008 dan pembubaran PPP, Newin membelot dari PPP ke BJT yang kemudian bergabung dengan koalisi DP. Diunduh dari : <http://www.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Asia/Story/A1Story20120521-347223/2.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2012, pada pukul 22.00 WIB.

**Tabel. 2.3.**  
**Konstelasi Kekuatan Partai Politik di Parlemen**  
**tahun 2007-2009 di Thailand**

<b>Koalisi Partai PPP tahun 2007</b>	<b>Koalisi Partai DP tahun 2009</b>
People's Power Party	Democrat Party
Ruamjaithai Chartpatana Party	Puea Pandin Party
Matchima Thipataya Party	Ruamjaithai Chartpatana Party
Pracharaj Raj Party	Matchima Thipataya Party
	Chart Thai Party
	Bhumjaithai Party
<b>Democrat Party (oposisi)</b>	<b>Puea Thai Party (oposisi)</b>

Sumber : diolah dari beberapa sumber

Dari tabel 2.3. diatas dapat dilihat komposisi koalisi di parlemen pasca runtuhnya rezim Thaksin di Thailand. RJT dan MTP merupakan partai yang membelot dari PPP yang dibubarkan. Dengan demikian, dari tabel diatas dapat dilihat terjadinya perubahan komposisi koalisi di parlemen sejak Abhisit terpilih menjadi PM Thailand. Sementara dipihak lain, partai Praharaj dan beberapa anggota dari PP termasuk Mun Patanothai selaku ketua partai tetap setia berdiri dibarisan PTP.

Chai Chidchob sebagai juru bicara Majelis Rendah menyatakan bahwa DP berhasil memperoleh 235 kursi setelah mengalahkan Pracha Promnok dari PP yang hanya meraih 198 kursi di parlemen.<sup>56</sup> Chai juga menambahkan bahwa Abhisit berhasil menang lebih dari separuh suara dan ia terpilih sebagai PM Thailand yang baru. Terpilihnya Abhisit sebagai PM Thailand kemudian ia menyusun kabinet baru agar pemerintahannya berjalan dengan baik. Tabel berikut adalah susunan kabinet pemerintahan Abhisit Vejjajiva pada 17 Desember 2008.

<sup>56</sup> "Thai Opposition Head to be New PM", diunduh dari : <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7782950.stm>, diakses pada tanggal 3 Januari 2011, pada pukul 23.00 WIB.

**Tabel. 2.4.**  
**Susunan Kabinet Abhisit Vejjajiva pada 17 Desember 2008**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Partai</b>
Perdana Menteri	Abhisit Vejjajiva	DP
Wakil Perdana Menteri	Suthep Thaugsuban	DP
Wakil Perdana Menteri	Korbsak Sabhavasud	DP
Wakil Perdana Menteri	Major General Sanan Kachornprasart	CTP
Menteri Negara	Satit Wongnongtaey	DP
Menteri Negara	Virachai Virameteekul	DP
Menteri Pertahanan	Jenderal Prawit Wongsuwan	DP
Menteri Keuangan	Korn Chatikavanij	DP
Wakil Menteri Keuangan	Pradit Pataraprasit	MTP
Wakil Menteri Keuangan	Pruttichai Damrongat	PP
Menteri Luar Negeri	Kasit Piromya	DP
Menteri Pariwisata dan Olah Raga	Chumpol Silpa-archa	CTP
Menteri Kesejahteraan Sosial	Witoon Nambutr	BJT
Menteri Pertanian dan Koperasi	Theera Wongsamut	DP
Wakil Menteri Pertanian dan Koperasi	Chartchai Pookayaporn	DP
Menteri Perhubungan	Sophon Saram	BJT
Wakil Menteri Perhubungan	Prajak Glawgraharn	BJT
Wakil Menteri Perhubungan	Kuakul Danchaivichit	CTP
Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Suwit Khunkitti	SAP
Menteri Teknologi Informatika dan Telekomunikasi	Ranongruk Suwunchwee	DP
Menteri Energi	Dr. Wannarat Channukul	RCP
Menteri Perdagangan	Pornthiva Nakasai	BJT
Wakil Menteri Perdagangan	Alonglorn Pollabutr	DP
Menteri Dalam Negeri	Chaovarat Chanweerakul	BJT
Wakil Menteri Dalam Negeri	Boonjong Wongtrairat	BJT
Wakil Menteri Dalam Negeri	Thaworn Senniam	DP
Menteri Kehakiman	Pirapan Salirathavibhaga	DP
Menteri Tenaga Kerja	Phaithoon Kaewthong	DP
Menteri Kebudayaan	Teera Slukpetch	DP

Jabatan	Nama	Partai
Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Khunying Kalaya Sophonpamich	DP
Menteri Pendidikan	Jurin Laksanawisit	DP
Wakil Menteri Pendidikan	Chaiwuti Bannawat	PP
Wakil Menteri Pendidikan	Narisara Chawaltanpipat	PP
Menteri Kesehatan Rakyat	Witthaya Keawparadai	
Wakil Menteri Kesehatan Rakyat	Manit Nop-armornbodi	BJT
Menteri Industri	Chaiwuti Bannawat	DP

Sumber : [http://www.boi.go.th/tir/issue/200901\\_19\\_1/document.pdf](http://www.boi.go.th/tir/issue/200901_19_1/document.pdf)

Dari susunan kabinet yang dibentuk oleh Abhisit Vejjajiva diatas, anggota kabinet dari DP menguasai lebih dari 50% dari seluruh kursi kabinet yang tersedia. Dalam kabinet Abhisit terdapat 37 orang Menteri dan Wakil Menteri yang menempati 20 Kementerian. DP telah memenangkan pemilu parlemen dan berhasil membentuk pemerintahan koalisi dengan partai lainnya, sedangkan PTP sebagai partai oposisi di parlemen Thailand.

Kabinet Abhisit merupakan hasil sebuah koalisi yang dibentuk pada akhir tahun 2008 pasca dibubarkannya PPP. DP mendapatkan dukungan dari 5 partai lainnya, termasuk BJT yang anggotanya merupakan mantan anggota parlemen dari PPP yang dibubarkan. Berikut ini adalah nama-nama yang menempati posisi strategis dalam kabinet Abhisit, yaitu :

1. Korn Chatikavanij sebagai Menteri Keuangan, ia merupakan teman lama Abhisit. Ia juga menjabat sebagai direktur disebuah perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi terbesar di Thailand. Ia juga menjabat sebagai Dewan Anggota Bursa Efek Thailand atau SET (*Stock Exchange of Thailand*).
2. Jenderal Prawit Wongsuwan sebagai Menteri Pertahanan, ia memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Anupong.
3. Kasit Piromya sebagai Menteri Luar Negeri, ia mantan duta besar AS dan Jepang. Ia ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri karena mendukung kelompok Kaus Kuning dan beberapa kali



mengadakan pertemuan dengan Kaus Kuning yang erat hubungannya dengan okupasi dua bandara Internasional Suvarnabhumi dan Don Muang.

4. Chaovarat Shanweerakul sebagai Menteri Dalam Negeri, ia merupakan PM sementara sebelumnya, pasca Somchai diberhentikan pada akhir tahun 2008.

DP menempatkan setengah dari 36 orang anggotanya di dalam kabinet Abhisit. DP telah mengamankan posisi penting dalam kabinet dengan menempatkan anggotanya di posisi Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Transportasi dan Menteri Dalam Negeri. Posisi lain diberikan kepada partai koalisi sebagai bentuk hadiah dalam kemenangan Abhisit dalam pemilu ketiga di parlemen Thailand. Kekecewaan datang dari masyarakat bisnis di Thailand yang melihat bahwa posisi Menteri Perdagangan dan Perindustrian, DP terlalu lemah dalam merekonstruksi ekonomi dan politik Thailand. Dua Menteri ini dianggap kurang memiliki pengalaman di bidang politik oleh kelompok bisnis Thailand.

### **2.2.2. Kebijakan Pemerintah Abhisit Vejjajiva**

Abhisit bersama dengan pemerintah mencanangkan program-program kerja setelah dibentuknya kabinet. Pada awal pemerintahan Abhisit, ia akan mengembalikan stabilitas politik di negaranya dengan melakukan tindakan tegas bagi setiap warga negara yang terbukti melakukan tindakan *Lèse Majesté* atau pelecehan terhadap Raja. Dengan demikian, pemerintah Abhisit memberlakukan beberapa kebijakan untuk menghadapi massa Kaus Merah yang menentang pemerintahannya. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa kebijakan yang diberlakukan pemerintah Abhisit, antara lain pemberlakuan UU penghinaan terhadap kerajaan (*Lèse Majesté*), UU Keadaan Darurat (*State of Emergency*), dan UU Kejahatan Komputer (*Computer Crime*).

### 2.2.2.1 Pemberlakuan UU Penghinaan terhadap Kerajaan (Lèse Majesté)

Pemerintahan Abhisit yang didukung oleh kelas menengah Bangkok, militer, Raja, dan rakyat di wilayah Selatan Thailand berjanji akan mengembalikan stabilitas politik. Pemerintah juga akan menindak tegas bagi setiap warga negara yang terbukti melakukan tindakan *Lèse Majesté* atau pelecehan terhadap Raja. Program ini dibawah kendali Kementerian Teknologi dan Informasi Thailand menutup 2.300 situs internet yang terbukti melakukan pelanggaran atas *Lèse Majesté*, sedangkan 200 situs lainnya sedang dalam proses penutupan.<sup>57</sup> Situs-situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran *Lèse Majesté* dibawah kendali kelompok Kaus Merah Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 80 juta Bath untuk menyukseskan program pencegahan atas pelanggaran *Lèse Majesté*.<sup>58</sup>

Menurut pasal 8 Konstitusi 2007 Thailand menyebutkan bahwa “Raja akan bertahta dalam posisi dihormati dan tidak boleh dilanggar, tidak ada satupun orang mengekspos dirinya dengan berbagai tuduhan atau tindakan”.<sup>59</sup> Pernyataan ini dikembangkan dari pasal 112 dari Hukum Pidana Thailand tahun 1958, sebagaimana telah diubah sejak tahun 1976, yang berbunyi “barang siapa memfitnah, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, sang Pewaris atau Bupati dapat dipidana tiga tahun, maksimal 15 tahun penjara”.<sup>60</sup> Dalam prakteknya, hukum semacam ini dikenal sebagai *Lèse Majesté (Injured Majesty)*, dalam artian suatu tindakan kejahatan yang melanggar posisi

<sup>57</sup> Giles Ji Ungkaporn, *Op. Cit.*, hlm 47.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>59</sup> Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 (B.E. 2550), Pasal 8, diunduh dari : [http://www.senate.go.th/th\\_senate/English/constitution2007.pdf](http://www.senate.go.th/th_senate/English/constitution2007.pdf), diakses pada tanggal 12 Februari 2012, pada pukul 20.30 WIB.

<sup>60</sup> Daria Redanskikh, *Op. Cit.*, hlm. 50.

kerajaan atau pelanggaran terhadap matabat sebuah pemerintahan berdaulat.

Dalam konteks hukum *Lèse Majesté* terdapat konflik serius antara kesucian dan hak istimewa monarki dengan hak-hak dasar yang demokratis dan kebebasan orang berpendapat. Penerapan hukum ini sudah berjalan lebih dari 40 tahun di Thailand. Para akademisi dan sarjana Thailand selalu dibenturkan dengan pembatasan tidak dibolehkan terlalu kritis terhadap penerapan hukum ini, justru mereka menghindari tuduhan melakukan pelanggaran hukum *Lèse Majesté* ini. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak pernah ditantang oleh pengacara yang membela tersangka di pengadilan.<sup>61</sup> Ribuan situs yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran *Lèse Majesté* ditutup diblokir, dan sejumlah orang ditangkap. Dalam perpolitikan Thailand, salah satu faktor penting adalah mereka harus mengikuti aturan tersebut, apabila mereka mengabaikan hukum *Lèse Majesté*, maka mereka akan ditindak tegas. Hal ini mendapat kecaman luas dari dunia internasional oleh para akademisi yang mengkampanyekan agar Thailand merubah aturan hukum mengenai *Lèse Majesté*.

Pada abad 19, hukum *Lèse Majesté* dikeluarkan oleh Raja Chulalongkorn pada tahun 1900. Dalam revisi pertama, tindakan pelanggaran terhadap hukum *Lèse Majesté* serius, dimana terjadi pencemaran nama baik melalui perkataan yang dapat melukai reputasi kerajaan dan pejabat Raja, sedangkan pelanggaran *Lèse Majesté* biasa, dituhkan kepada pencemaran nama baik terhadap warga negara. Perbedaan dari kedua pelanggaran tersebut tidak terlalu signifikan, pelanggaran *Lèse Majesté* serius dikenakan pidana tiga tahun penjara (beberapa tahun kemudian hukuman itu menjadi tujuh tahun penjara),

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

sedangkan pelanggaran *Lèse Majesté* biasa hanya dua tahun penjara.

Sejak Revolusi 1932, setelah runtuhnya monarki absolut tidak merubah konstruksi hukum yang sudah ada. Akan tetapi, para revolusioner mencetuskan ide perubahan aturan hukum atas tindakan yang termasuk dalam tindakan kejahatan terhadap kerajaan. Hal ini terinspirasi dari nilai-nilai demokrasi yakni kebebasan berpendapat, dimana anggota parlemen sebagai warga negara diperbolehkan mengekspresikan kritik mereka terhadap negara. Pada tahun 1958 terjadi penyesuaian atas konsep dasar hukum *Lèse Majesté*, dimana awalnya kata kunci 'fitnah', akhirnya dirubah menjadi 'penghinaan'. Dalam pengertian fitnah lebih sempit karena hanya sebatas tindakan merusak reputasi, dibandingkan dengan konsep 'penghinaan', maka tindakan ini jauh lebih kejam karena sudah melukai pihak kerajaan.

Perubahan situasi terjadi secara dramatis pada akhir tahun 2005, dimana Raja menyiarkan pidato ulang tahunnya yang disiarkan di radio, ia menyatakan bahwa jika Raja tidak dapat berbuat salah, itu sama saja dengan melihat keatas-kebawah, tapi Raja juga dapat melakukan kesalahan.<sup>62</sup> Pidato tersebut membawa inspirasi bagi masyarakat agar Thailand lebih demokratis dalam hal menyampaikan pendapat. Namun, situasi politik semakin memanas ketika kudeta militer September 2006 mengambilalih paksa kekuasaan Thaksin. Akibatnya, jumlah pelanggaran terhadap *Lèse Majesté* semakin meningkat drastis. Menurut buku tahunan statistik Kehakiman Thailand, kasus *Lèse Majesté* mencapai 30 orang dijerat oleh hukum tersebut, 20 orang diantaranya diadili di pengadilan.

---

<sup>62</sup> The Nation, "Royal Birthday Address: King can do wrong", diunduh dari : [http://www.nationmultimedia.com/2005/12/05/headlines/data/headlines\\_19334288.html](http://www.nationmultimedia.com/2005/12/05/headlines/data/headlines_19334288.html), diakses pada tanggal 14 Februari 2012, pada pukul 22.00 WIB.

Jumlah tersebut meningkat ditahun berikutnya, yakni mencapai 126 orang. Pada tahun 2008.

Menurut Hinke C.J sebagai koordinator FACT (*Freedom Against Censorship Thailand*) menyatakan bahwa akumulasi tindak pelanggaran terhadap *Lèse Majesté* yang mencapai 765 orang dalam periode tahun 2006-2009 , rata-rata 191 orang per tahun.<sup>63</sup> Salah satu contoh kasus pelanggaran *Lèse Majesté* adalah kasus Harry Nicolaides, seorang penulis berasal dari Australia. Harry dijatuhi hukuman selama tiga tahun penjara karena dianggap melakukan pelanggaran *Lèse Majesté*. Namun, ia hanya menjalankan hukuman penjara hanya satu bulan, karena ia mendapatkan pengampunan dari Raja atas tindakannya.<sup>64</sup> Budaya paternalistik sangat melekat di Thailand, mayoritas masyarakat menerima Raja sebagai simbol suci bangsa Thai dan agama Buddha.

Hambatan lain dalam menyelesaikan konflik di Thailand tidak hanya fokus terhadap pemerintahan koalisi yang menggunakan strateginya dalam menyingkirkan lawan politiknya. Namun, di sisi lain ada gerakan kelompok Kaus Merah yang dianggap sebagai gerakan demokratis yang mendukung tercipta keadilan dan kebebasan dimasyarakat. Hal ini yang terjadi saat itu, ketika gerakan Kaus Merah dalam memperjuangkan keadilan di negaranya pasca kudeta militer 2006.

Menurut para ahli dari ICG (*International Crisis Group*) menyatakan bahwa hukum *Lèse Majesté* yang diterapkan di Thailand harus dirubah, dimana perubahan itu meliputi

<sup>63</sup> “Interview on Lese Majeste with David Strefuss”, diunduh dari : <http://prachatai3.info/english/node/2068>, diakses pada tanggal 18 Februari 2012, pada pukul 22.30 WIB.

<sup>64</sup> “Lese Majeste: Abuse and Benevolence”, diunduh dari : <http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx>, diakses pada tanggal 20 Februari 2012, pada pukul 19.00 WIB.

berkurangnya hukuman berat 3 – 15 tahun penjara dan kewenangan jaksa dalam mengadili seseorang yang melanggar hukum *Lèse Majesté* harus.<sup>65</sup> Menurut ICG pengganti Undang-undang hukum ini akan menciptakan kondisi yang lebih kondusif yang selanjutnya dibahas dalam sebuah forum tentang peran monarki itu sendiri. Dalam surat kabar harian *The Nation*, menyebutkan bahwa tidak ada tempat bagi hukum *Lèse Majesté* dalam masyarakat yang demokratis, karena mereka bebas menyampaikan aspirasinya dalam mengeluarkan kritik terhadap pemerintah maupun negara, tanpa harus adanya ketakutan yang dibayang-bayangi oleh ‘penganiayaan’.<sup>66</sup> David Streckfuss menyampaikan bahwa setuju dengan pernyataan di atas, tetapi ia menjadi skeptis kemungkinan dihapusnya hukum *Lèse Majesté* dalam waktu dekat. Ia jug menambahkan perlunya mengubah pasal 112 dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Thailand dengan menambahkan bahwa dalam penggunaan *Lèse Majesté* hanya berlaku atas persetujuan dan perintah Raja.<sup>67</sup>

#### 2.2.2.2. Pemberlakuan UU Keadaan Darurat (*State of Emergency*)

Massa yang tidak mepedulikan penerapan ISA yang membatasi gerakan mereka kemudian ribuan massa Kaus Merah berkumpul di Bangkok melakukan aksi protes. Pemerintah Abhisit dua kali memberlakukan ISA dan menyatakan keadaan darurat di Bangkok dan lima provinsi disekitarnya. Berdasarkan pasal 9 UU Keputusan Darurat tahun 2005, pemerintah

<sup>65</sup> International Crisis Group, *Bridging Thailand's Deep Divide*, *Crisis Group Asia Report No. 192*, hlm. 24.

<sup>66</sup> The Nation, “An open letter to the red shirts”, diunduh dari : <http://www.nationmultimedia.com/home/2010/05/25/opinion/An-open-letter-to-the-red-shirts-30130094.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2012, pada pukul 23.00 WIB.

<sup>67</sup> “Thai means free: FACT coordinator CJ Hinke comments on lesemajeste”, diunduh dari : <http://www.prachatai.com/english/node/619>, diakses pada tanggal 29 Januari 2012, pada pukul 22.00 WIB.

melarang sekelompok orang berkumpul, lima orang atau lebih dan juga bagi mereka yang melakukan tindakan provokasi yang menciptakan situasi kerusuhan, antara lain :

1. Mengganggu ketertiban lalu lintas.
2. Mengganggu kegiatan perekonomian dan kehidupan masyarakat umum.
3. Merusak fasilitas umum, seperti menciptakan kerusakan, gangguan, ketakutan, dan kecemasan di masyarakat.
4. Tidak mematuhi aturan dari pemerintah terkait dengan aksi demonstrasi yang bertujuan terciptanya kedamaian.

Pemerintah telah menetapkan 139 orang tersangka terhadap pelanggaran UU Keadaan Darurat. Mereka harus menjalani hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal 40.000 Bath. Pelanggaran UU Keadaan Darurat diberlakukan atas tindakan kekerasan yang terjadi pada 10 April 2010. Pasca terbunuhnya Seh Daeng pada 13 Mei 2010, putusan mengenai Keadaan Darurat diperluas hingga 15 provinsi lainnya di sekitar kota Bangkok. Pemerintah sampai dengan tanggal 19 Mei telah memberlakukan Keadaan Darurat berjumlah 24 provinsi. Hal ini mendapat respon dari kelompok Kaus Merah yang dijuluki teroris oleh pemerintah Abhisit.<sup>68</sup>

#### **2.2.2.3. Pemberlakuan UU Kejahatan Komputer**

Kelanjutan dari pemberlakuan UU *Lèse Majesté* yang membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat, kemudian pemerintah Abhisit mulai memberlakukan diberlakukannya UU Kejahatan Komputer yang sejak tanggal 18 Juli 2007. UU ini mulai berlaku sejak internet sebagai media komunikasi yang populer dikalangan masyarakat Thailand, khususnya di

---

<sup>68</sup> Amsterdam & Peroff LLP, *The Bangkok Massacres: A Call for Accountability*, hlm. 51-52.

perkotaan Thailand. Beredarnya informasi yang secara cepat, luas, bebas, dan tidak terbatas kemudian hal ini sulit dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah Abhisit berupaya untuk mengendalikan penyebaran fakta-fakta dan ide-ide yang bertentangan dengan pemerintah. Hal ini kemudian diberlakukannya UU Kejahatan Komputer dalam mencegah tindakan kejahatan melalui internet. Bagian terakhir dari UU Kejahatan Komputer adalah ketentuan tentang kriminalisasi penyebaran informasi melalui internet yang mengancam pihak kerajaan atau yang bertentangan dengan stabilitas politik. Pemerintah menargetkan pada situs-situs internet yang berada di bawah kendali kelompok Kaus Merah. Pemerintah berhak menutup situs-situs tersebut tanpa harus melalui putusan pengadilan.<sup>69</sup>

Pemerintah Abhisit melalui CPAO (*Centre for the Administration of Peace and Order*) dan CRES (*Center for the Resolution of the Emergency Situation*) menutup situs-situs internet yang melanggar UU Keadaan Darurat. Satit Wongnongtaey, Menteri Negara yang bertanggung jawab dalam bidang media menetapkan bahwa pemerintah menutup stasiun televisi PTV (*People's Television*), lima majalah, dan sejumlah radio komunitas yang dioperasikan oleh kelompok Kaus Merah pada tanggal 8 April 2010. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kedamaian dan ketertiban, serta menghentikan penyebaran informasi palsu yang beredar di masyarakat.

Pemerintah menutup radio komunitas lebih dari 47 radio komunitas di 37 provinsi. Tabel berikut adalah radio komunitas yang ditutup oleh pemerintah karena dianggap menyebarkan isu kekerasan dalam aksi demonstrasi di Bangkok.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 53.



**Tabel 2.5.**  
**Radio Komunitas Kaus Merah yang ditutup Pemerintah**  
**Abhisit Vejjajiva di Thailand**

<b>Provinsi</b>	<b>Radio Komunitas</b>
Chiang Mai	FM 92.5 MHz, FM 105.5 MHz, FM 89 MHz, and FM 99 MHz.
Chiang Rai	FM 107.5 MHz
Udon Thani	FM 97.5 MHz, FM 99.75 MHz, FM 91.25 MHz, and FM 95.25 MHz
Khon Kaen	FM 105.5 MHz and FM 98.75 MHz
Mukdahan	FM 106.75 MHz
Ubon Ratchathani	FM 99.25 MHz and FM 91 MHz
Pathum Thani	FM 96.75 MHz
Samut Prakam	FM 101 MHz, FM 104.75 MHz, and FM 97.25 MHz
Chachoengsao	FM 107.75 MHz and FM 105.75 MHz
Bangkok	FM 106.8 MHz, FM 108 MHz, FM 92.75 MHz, FM 107.75 MHz, FM 107.5 MHz, FM 90.75 MHz, FM 95.25 MHz, FM 95.75 MHz, and FM 93.25 MHz

Sumber : Human Right Watch, *Descent into Chaos: Thailand's 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown*, (US: Human Right Watch, 2010), hlm. 143.

### **BAB 3**

#### **PERAN KELOMPOK KAUS MERAH DALAM MENJATUHKAN REZIM ABHSIT VEJJAJIVA DI THAILAND (2008-2011)**

Terpilihnya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand mengundang aksi protes para pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah. Intervensi militer dalam pembentukan koalisi di parlemen dilansir menjadi salah satu faktor keterlibatan militer dalam campur tangan politik Thailand. DP yang berkuasa yang didukung oleh militer, kerajaan, dan kelompok 'Kaus Kuning' mengakibatkan konflik ditingkat perpolitikan nasional Thailand semakin tajam. Kali ini giliran kelompok Kaus Merah dalam menggelar aksi protes atas terpilihnya Abhisit menjadi PM Thailand yang tidak mewakili rakyat seluruhnya.

Berbagai upaya strategi dilakukan oleh kelompok Kaus Merah dalam melakukan tekanan untuk meruntuhkan rezim Abhisit. Mereka menerapkan strategi mobilisasi dan okupasi dalam melawan pemerintah, salah satunya kelompok ini mendirikan sekolah politik yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada anggotanya dalam melakukan sebuah gerakan. Di awal pemerintahan Abhisit, Kaus Merah menggagalkan ASEAN-Summits di Pattaya dan melakukan okupasi di kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok pada Maret-Mei 2010. Bentrokan yang terjadi pada Maret-Mei 2010 antara militer dengan para demonstran setidaknya 91 orang meninggal dunia ribuan orang lainnya terluka.

Dalam bab ini akan menjelaskan aksi demonstrasi, okupasi, dan mobilisasi yang dilakukan kelompok Kaus Merah, sehingga menciptakan instabilitas politik dan turunnya popularitas Abhisit yang kemudian rezim Abhisit Runtuh. Bab ini akan memfokuskan tekanan kelompok Kaus Merah dalam menggagalkan ASEAN-Summits di Pattaya dan okupasi kawasan bisnis di Ratchaprasong, serta strategi mobilisasi massa Kaus Merah dalam menggalang massa.

### 3.1. Aksi Pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort di Pattaya

Peristiwa kekerasan politik pasca terpilihnya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand terjadi semasa pemerintahannya. Hal ini direspon oleh kelompok protes anti-pemerintah yang tergabung ke dalam kelompok Kaus Merah. Mereka menyerang “iring-iringan” mobil Abhisit yang ingin menghadiri ASEAN-Summits di Pattaya pada 7 April 2009. Demontran yang menggunakan atribut berwarna merah bentrok dengan kelompok pro-pemerintah di Pattaya pada 10-11 April 2009. Para demontran berhasil menduduki Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya tempat diselenggarakannya KTT-ASEAN. Pemerintah mengumumkan bahwa status Thailand dalam keadaan darurat.<sup>70</sup>

Serangkaian kegiatan KTT-ASEAN ke-14 di Pattaya sudah disusun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Massa yang berhasil menduduki Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya dan akhirnya pertemuan tersebut dibatalkan melihat kondisi politik Thailand yang sedang bergejolak saat itu. Ketegangan politik yang terjadi di Pattaya memaksa para pemimpin-pemimpin negara ASEAN ditambah pemimpin Asia Timur dan Australia dievakuasi dari lokasi konflik menggunakan perahu dan helikopter. Insiden di Pattaya pada April 2009 merusak citra Thailand di dunia internasional sebagai tuan rumah KTT-ASEAN.

Kekerasan berlanjut di Bangkok dan provinsi disekitarnya pada 12 April 2009. Para pengunjung rasa berhasil masuk ke Departemen Dalam Negeri di Bangkok, dimana saat itu Abhisit sedang bertemu dengan pejabat senior pemerintah. Peristiwa penyerangan “iring-iringan” mobil PM terulang ketika massa yang marah kemudian memaksa keluar orang-orang dari mobil dan memukuli mereka. Massa kembali menggelar aksi pada keesokan harinya pada 13 April 2009, mereka melakukan okupasi di daerah Daeng Din dengan menggunakan bus dan taksi. Ratusan supir taksi memarkir kendaraan mereka disekitar Monumen Demokrasi. Hal ini mengakibatkan kemacetan hingga beberapa kilometer.<sup>71</sup> Massa yang semakin anarkis menyerang militer yang mulai

<sup>70</sup> Human Right Watch, *World Report 2010: Event of 2009* (US: Human Right Watch, 2010), hlm. 355-356.

<sup>71</sup> Daily Xpress, *As it Happened Yesterday: Red Shirt Protesters use Taxis to Straggle Central Bangkok; Desperate Cummuters overload Skytrain*, Vol. 2, No. 317, Jum'at 10 April 2009.

dengan senjata, bom molotov, dan senjata rakitan lainnya. Mereka juga mengancam akan meledakkan bus yang membawa BBG (Bahan Bakar Gas) yang berada didekat rumah sakit dan pemukiman warga. Dalam situasi anarkis, militer mulai menggunakan gas air mata dan senjata dalam mencegah dan membubarkan massa. Insiden ini setidaknya mengakibatkan 123 orang terluka, empat orang diantaranya adalah pihak militer.

Terpilihnya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand mendapat tekanan dari kelompok Kaus Merah diawal masa pemerintahannya tahun 2009. Kelompok Kaus Merah melihat adanya campur tangan militer dalam kemenangan Abhisit pasca dibubarkannya partai PPP. Thaksin yang berada dipengasingannya menyatakan bahwa PM Abhisit merupakan boneka dari Dewan Penasihat, Jenderal Prem Tinsulanonda. Thaksin menyerukan kepada pendukungnya yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah untuk melakukan revolusi rakyat (*People's Revolution*) dengan slogan “gulingkan bangsawan” dalam bahasa Thai, *Khon Ammat*.<sup>72</sup> Massa yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah menggelar aksi protes terhadap pemerintahan Abhisit di depan gedung parlemen Thailand.

Pemerintahan Abhisit yang didukung oleh militer, kerajaan, dan kelompok ‘Kaus Kuning’ kembali mendapatkan tekanan dari pendukung Thaksin. Massa kelompok Kaus Merah menilai pemerintahan Abhisit tidak sah karena tidak melibatkan seluruh rakyat dalam proses pemilihannya. Hal inilah yang menjadi ‘bom waktu’ sewaktu-waktu bagi para kelompok penentang Abhisit. Sama halnya dengan dua PM sebelumnya dari partai PPP (Samak dan Somchai) mendapat tekanan dari kelompok Kaus Kuning dengan melakukan okupasi dua bandara internasional Suvarnabhumi dan Don Muang. Kali ini giliran kelompok Kaus Merah yang mengadopsi strategi okupasi dengan menduduki objek-objek vital untuk menciptakan instabilitas politik. Massa yang terorganisir mengepung Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, dimana tempat diselenggarakannya pertemuan para petinggi negara-negara di Asia Tenggara ditambah dengan para pemimpin di Asia Timur dan Australia. Peristiwa tersebut berlangsung selama dua

---

<sup>72</sup> “Did Thaksin Call for Revolution?”, Diunduh dari : <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2009/04/23/did-thaksin-call-for-revolution/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2012, pada pukul 23.00 WIB.

hari tanggal 10-11 April 2009. Pemerintah membatalkan KTT-ASEAN dan menyatakan keadaan darurat pada tanggal 11 April 2009 di Pattaya. Pemerintah juga memberlakukan keadaan darurat di Bangkok dan provinsi disekitarnya pada tanggal 12 April. Demonstrasi yang terjadi di Bangkok, kelompok Kaus Merah memaksa masuk kedalam gedung Kementerian Dalam Negeri di Bangkok, dimana Abhisit sedang bertemu dengan bertemu dengan pejabat senior, dan kembali menyerang iring-iringan mobilnya dan menyeret orang-orang dari mobil dan memukuli mereka.

Kelompok Kaus Merah juga menggelar aksi anarkis pada tanggal 13 April 2009, di Bangkok. Pecahnya insiden kekerasan dan kerusakan di Bangkok dimotori oleh kelompok Kaus Merah garis keras dengan aksi memblokir jalan pada persimpangan utama di daerah Daeng Din dengan bus dan taksi. Mereka menyerang tentara yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, dengan bom Molotov, ketapel, dan senjata buatan lainnya. Pengunjuk rasa juga mengancam akan meledakkan truk yang membawa bahan gas cair di dekat wilayah pemukiman dan rumah sakit. Akhirnya, aparat keamanan terpaksa menggunakan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan para demonstran yang memblokade daerah Daeng Din agar kerusakan tidak meluas ke daerah lain. Dari insiden ini sedikitnya 123 orang terluka, termasuk empat orang tentara. Ribuan pengunjuk rasa kemudian mundur ke perkemahan utama mereka di luar gedung pemerintah pada 14 April 2009.

Peristiwa kerusakan di Bangkok bersamaan dengan liburan *Songkran* atau tahun baru Thailand. Dari sinilah terlihat aksi yang digelar oleh kelompok Kaus Merah agar mendapat simpati dari publik karena bertepatan dengan hari libur nasional Thailand. Dari insiden ini memaksa polisi dan militer mengambil tindakan tegas dalam mencegah dan membubarkan massa yang anarkis. Tindakan represif yang diambil oleh aparat keamanan mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa. Pemerintah yang awalnya memberikan peringatan kepada aparat agar berhati-hati dalam mengambil tindakan, akhirnya bentrokan senjata pecah di Bangkok.

Pemerintah memperingatkan kepada para pemimpin Kaus Merah agar membubarkan massanya. Pemimpin gerakan kemudian membubarkan para demonstran kembali ke daerah mereka masing-masing. Ribuan massa yang dibubarkan paksa kemudian pulang dengan menggunakan bus umum yang telah disediakan. Identitas para pengunjung rasa dicatat oleh pihak aparat sebelum membubarkan mereka. Pemimpin kelompok Kaus Merah melihat pemerintah Abhisit menggunakan standar ganda dengan menggunakan pasukan keamanan bersenjata lengkap dalam menghadapi Kaus Merah. Dari peristiwa ini, kelompok Kaus Merah merasa termarjinalisasikan oleh pemerintah, jika membandingkan sikap pemerintah dalam menghadapi massa kelompok Kaus Kuning yang melakukan okupasi dua bandara internasional pada tahun 2008 lalu. Dari sinilah terlihat kegagalan kelompok Kaus Merah dalam meruntuhkan rezim Abhisit. Mereka kembali ke barak mereka masing-masing dan merencanakan strategi baru dalam mempersiapkan aksi unjuk rasa yang lebih besar di tahun 2010 mendatang.

Kelompok Kaus Merah merasa posisi mereka di 'anak tirikan' oleh pemerintah, dibandingkan dengan kelompok Kaus Kuning yang menggelar aksi okupasi penutupan 2 bandara terbesar di Thailand. Pemerintah mengakui bahwa mereka gagal dalam menjaga stabilitas politik saat KTT-ASEAN berlangsung. Pemerintah gagal memberlakukan ISA (*Internal Security Act*) selama KTT berlangsung, dimana hal ini memungkinkan militer untuk mengambil alih sebelumnya. Keamanan PM Abhisit semakin terancam ketika massa Kaus Merah merusak mobilnya dengan tongkat dan dilempari dengan batu. Polisi yang berjaga-jaga dilaporkan gagal menghalau aksi anarkis tersebut.

### 3.2. **Pendirian Sekolah Politik *rongrean pathibatngan nor por cho daeng thang pangdin***

Kegagalan kelompok Kaus Merah dalam menjatuhkan rezim Abhisit pada gerakan April 2009 membuat kelompok ini mengadopsi strategi baru dalam persiapan aksi unjuk rasa berikutnya. Tragedi pembubaran massa oleh militer membuat para pada bulan April 2009 menjadi pengalaman bagi para pemimpin Kaus Merah dalam merencanakan sebuah gerakan yang terarah. Dari kegagalan inilah, terlihat begitu mudahnya pasukan keamanan membubarkan para

demonstran. Militer membantah tuduhan Thaksin yang menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kekerasan yang menyebabkan ada anggota Kaus Merah yang terbunuh selama pembubaran. Selama operasi pembubaran kelompok Kaus Merah pada 13 April 2009, media asing maupun media lokal diizinkan untuk selalu mengikuti pasukan militer dalam meliput peristiwa yang terjadi. Kelompok Kaus Merah menyatakan bahwa setidaknya ada 6 orang demonstran tewas dalam bentrokan dengan militer dan mayat mereka dibawa pergi oleh militer, tapi belum mampu untuk mendukung klaim dengan sumber-sumber independen.

Pemimpin Kaus Merah menganalisis kesalahan atau gagalnya gerakan pada bulan April 2009 lalu, karena begitu mudahnya pihak militer membubarkan para demonstran. Kali ini, para pemimpin Kaus Merah mulai merencanakan strategi baru dalam memobilisasi massa yang lebih besar lagi untuk persiapan aksi demonstrasi yang lebih terorganisir tahun 2010 mendatang. Strategi yang diterapkan oleh kelompok Kaus Merah adalah dengan mendirikan sekolah politik yang bernama (dalam bahasa Thai, *rongrean pathibatngan nor por cho daeng thang pangdin*) agar para pendukungnya memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam melakukan aksi gerakan pada bulan September 2009.<sup>73</sup> Nisit Sinthuphrai merupakan salah satu pemimpin Kaus Merah dan mantan anggota eksekutif dari PPP menjabat sebagai direktur di sekolah politik tersebut.

Gerakan yang akan disiapkan untuk menjelang tahun 2010 dengan sebutan “*One Million Man*” di Bangkok. Untuk mempersiapkan keberhasilan, kelompok Kaus Merah mendirikan lebih dari 450 sekolah politik. Ratusan ribu pendukung Kaus Merah yang mengikuti sesi pembelajaran Persiapan untuk demonstrasi pada tahun 2010 mendatang agar gerakan mereka lebih terarah dan kuat. Tabel berikut adalah tugas atau peran para pemimpin Kaus Merah dalam memberikan materi pembelajaran di sekolah politik.

---

<sup>73</sup> Internatioanl Crisis Group, “*Bridging Thailand’s Deep Divide*, *Crisis Group Asia Report No. 192*, 5 July 2010”, hlm. 14. Diunduh dari : [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/thailand/192\\_Bridging%20Thailands%20Deep%20Divide.pdf](http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/thailand/192_Bridging%20Thailands%20Deep%20Divide.pdf), diakses pada tanggal 28 Desember 2011, pada pukul 23.00 WIB.

**Tabel 3.1.**  
**Peran Pemimpin Kaus Merah dalam Sekolah Politik**

Nama	Karir	Peran
Nattawut Saikuea	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Jenderal dan juru bicara Kaus Merah.</li> <li>- Politisi Thailand</li> <li>- Anggota parlemen dari partai Phue Thai.</li> <li>- Juru bicara pemerintahan Somchai Wongsawat tahun 2008.</li> <li>- Wakil Menteri Pertanian di kabinet Yingluck Shinawatra Jilid 2.</li> </ul>	Memberikan materi tentang demokrasi.
Dr. Waeng Tojirakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Medis.</li> <li>- Mantan pemimpin gerakan pro-demokrasi Mei 1992.</li> </ul>	Memobilisasi massa dan membangun jaringan ditubuh Kaus Merah
Wiphuthalaeng Patthanaphumthai	Mantan aktivis pemimpin kelompok anti-kudeta, dalam bahasa Thai <i>wansomai-ao phadetkan</i> atau <i>Saturday People Against Dictatorship</i>	Memberikan materi tentang rezim aristokrat.
Wisa Khanthap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyanyi,</li> <li>- artis, dan</li> <li>- aktivis politik, bergabung dengan gerakan demokrasi tahun 1970an atau generasi Oktober.</li> </ul>	Memberikan materi tentang sebuah gerakan dalam memperjuangkan demokrasi tanpa kekerasan.
Adisorn Phaengket	Politisi senior yang dilarang berpolitik selama 5 tahun bersama partai TRT),	
Woraphon Phrommikabut	Mantan Dekan, fakultas Sosiologi dan Antropologi, di Thammasat University	Mengajarkan pendidikan analisa politik
Jatuporn Phromphan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu pemimpin Kaus Merah.</li> <li>- Politikus Thailand.</li> <li>- Aktivis politik.</li> <li>- Anggota parlemen dari partai Phue Thai.</li> </ul>	



Nama	Karir	Peran
Jaran Ditthaphichai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen di Rangsit University.</li> <li>- Mantan komisaris di NHRC (<i>National Human Right Commision</i>) dan ia dipaksa mengundurkan diri setelah bergabung dengan Kaus Merah.</li> </ul>	Memberikan materi tentang ilmu pengetahuan dalam sebuah gerakan dan kerjasama tim yang baik.

Sumber : *Urbanized Villagers in the 2010 Thai Redshirt Protests*. Edition, Vol. 51, No. 6, Nov/Dec 2011, pp. 993-1018

Dari tabel 3.1. diatas dapat dilihat peran para pemimpin kelompok Kaus Merah dalam meberikan materi pembelajaran kepada anggotanya. Materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar di sekolah politik lebih memfokuskan kepada pemahaman tentang demokrasi, teknis pengorganisasian, perjuangan tanpa kekerasan, kerja tim, dan analisa politik. Sesi pembelajaran berlangsung selama satu atau dua hari sekali di beberapa provinsi bagian Utara dan Timur Laut Thailand. Selama didirikannya sekolah tersebut sedikitnya ada 16.700 orang yang telah mendaftar dan bergabung ke dalam sekolah politik tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai struktur pemimpin Kaus Merah, dalam struktur kepemimpinan tersebut yang paling menonjol adalah Veera Muskaphong, Jatuporn Promphan, dan Nattawut Sikuea yang mendominasi gerakan Kaus Merah dari awal. Mereka mempersiapkan aksi unjuk rasa pada tahun 2010 mendatang yang didukung dengan massa yang telah dibekali selama sesi pembelajaran. Selain itu mereka yang memobilisasi massa melalui media cetak, maupun elektronik.

Kelompok Kaus Merah berhasil mendapatkan dukungan masyarakat miskin di pedesaan maupun diperkotaan. Banyak pengamat menyatakan bahwa gerakan ini merupakan perjuangan kelas, antara kaya dan miskin. Namun, mereka menuntut adanya keadilan sosial dan kesempatan ekonomi di negeri ini. Kelompok ini lebih memfokuskan tujuannya pada kesempatan yang sama dan kesetaraan. Kelompok Kaus Merah hanya menuntut supaya mereka bisa mendapatkan hak dasar untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat. Kelompok Kaus Merah memiliki agenda politik yang disusun dalam enam prinsip

yang menekankan pada perjuangan mereka atas ketidakpuasan marginalisasi ekonomi :

1. Mencapai tujuan membangun demokrasi sejati, dimana Raja sebagai Kepala Negara. Kami menolak setiap usaha masa lalu, masa atau masa depan dalam membungkam kebebasan berpendapat.
2. Menghapus Konstitusi 2007 dan mengembalikan Konstitusi Rakyat 1997, yang kemudian direvisi melalui konsultasi, transparansi, dan demokratis.
3. Membawa warga Thailand bersama-sama memecahkan permasalahan ekonomi, sosial, dan politik.
4. Menerapkan aturan hukum, proses, dan keadilan yang sama tanpa ada perbedaan.
5. Menyatukan semua warga Thailand yang mencintai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan yang sama dari semua aspek di masyarakat.
6. Menggunakan cara-cara damai atau tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan.

### **3.3. Aksi Pendudukan Kawasan Bisnis Ratchaprasong di Bangkok**

Krisis politik yang terjadi di awal tahun 2010 masih seputar Thaksin Shinawatra. Situasi politik semakin tidak stabil setelah MA Thailand mengeluarkan putusan penyitaan aset Thaksin sebesar 46 miliar Bath atau setara dengan \$US 1.4 miliar pada 26 Februari 2010. Paul Chambers menyatakan bahwa vonis atas penyitaan harta Thaksin sama saja memberikan ruang bernapas bagi kelompok Kaus Merah. Ia menambahkan bahwa akibat vonis ini suatu saat kelompok loyalis ini akan meletus seperti ledakan vulkanis dimasa yang akan datang. Thitinan Pongsudhirak juga berpendapat tentang hal yang sama, ia menyatakan bahwa putusan MA tersebut merupakan konsesi elit politik bagi Thaksin agar ia menghentikan aksi tekanan kelompok Kaus Merah dari tempat pengasingannya.

Kelompok Kaus Merah mulai menggelar aksi protes dengan menduduki kawasan bisnis Ratchaprasong di kota Bangkok. Di sebelah barat laut kawasan

Ratchaprasong terdapat *Central World Plaza* atau salah satu mall terbesar di dunia yang menawarkan pusat perbelanjaan, bioskop, dan *Tepin Bowling Megaplex*. Di sebelah timur laut, terdapat dua mall raksasa, yaitu *Gaysorn Plaza* dan *Big C Superstore*.<sup>74</sup> Bangunan-bangunan besar yang mendominasi kawasan Ratchaprasong merupakan pusat titik aksi selama protes berlangsung. Ketegangan semakin meningkat setelah ribuan demonstran berhasil menduduki kawasan komersial di Ratchaprasong pada 3 April 2010. Hal ini memaksa mall dan hotel bintang lima harus menghentikan kegiatan mereka dan menutup tokonya lebih awal. Kekacauan berlanjut di depan gedung parlemen Thailand.

Salah satu pemimpin Kaus Merah, Arisman Phungruanggrong bersama ribuan demonstran menyerbu parlemen Thailand dan memaksa anggota legislatif berhenti beraktifitas. Arisman memerintahkan kepada pengunjung rasa untuk menangkap Suthep Thaugsuban, karena ia yang memerintahkan polisi menembakkan gas air mata kearah demonstran. Akibat dari kerusuhan di parlemen memaksa Suthep, menteri kabinet, dan anggota parlemen yang menjadi target sasaran amukan massa dievakuasi melalui helikopter. Tragedi penghinaan terhadap kabinet Abhisit, kemudian pemerintah membentuk lembaga pusat penyelesaian situasi darurat atau CRES (*Center for the Resolution of Emergency Decree*) yang dipimpin oleh Suthep. CRES bertugas memberlakukan jam malam, melarang pertemuan, membatasi gerakan, dan menahan tersangka, serta melakukan sensor terhadap situs-situs, radio, dan siaran TV yang dianggap mengancam pemerintah. CRES yang dipimpin oleh Suthep kemudian memberlakukan jam malam bagi masyarakat.

Kelompok Kaus Merah kembali menggelar aksi protes pada 10 April 2010. Bentrokan antara militer dengan para demonstran pecah di daerah *Phan Fa Bridge*, Ratchaprasong. Insiden berdarah ini mengakibatkan 26 orang tewas dan 800 orang lebih terluka. Pemerintah Abhisit menjuluki kelompok Kaus Merah sebagai teroris. Hal ini ditandai dengan spanduk besar yang bertuliskan “*Peacefull*

---

<sup>74</sup> Andrew MacGregor Marshall, *Thailand's Moment of Truth: A Secret History of 21st century Siam*, hlm. 2. Di unduh dari : <http://www.zenjournalist.com/wp-content/uploads/2012/02/TS31.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2012, pada pukul 20.00 WIB.

*Protesters, Not Terrorist*".<sup>75</sup> Kelompok Kaus Merah menganggap bahwa status darurat yang dikeluarkan oleh Abhisit memberikan peluang militer keluar dari barak mereka untuk membubarkan massa yang terpusat di Ratchaprasong. Pemerintah Abhisit mengambil langkah-langkah represif dalam menghadapi massa Kaus Merah. Dibalik insiden ini, ada pihak ketiga yang mencoba menyusup kebarisan kelompok Kaus Merah atau biasa dikenal dengan *Man in Black*.

Pemerintah mulai mengambil tindakan represif dengan menggunakan hukum yang kejam membubarkan para demonstran dengan mengerahkan pasukan militer yang bersenjata lengkap. Operasi ini dilakukan oleh militer sebagai upaya pengambilan daerah Ratchaprasong yang berhasil diduduki oleh kelompok Kaus Merah pada 10 April 2010. Meskipun para demonstran berjanji untuk tidak ada kekerasan saat unjuk rasa berlangsung, akan tetapi kekerasan diawali oleh kelompok Kaus Merah yang menyerang barisan pertahanan pihak pemerintah. Militer diserang dengan granat dan ditembak oleh orang-orang kelompok bersenjata yang tidak dikenal. Serangan itu mengakibatkan lima orang tewas, termasuk seorang Komandan dari pihak militer, yakni Kolonel Romklao Thuwatham. Militer membalas serangan tersebut dengan menembakan amunisi kearah kerumunan massa, akibatnya 21 orang warga sipil tewas dan menurut hasil otopsi menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang tertembak dengan peluru dengan kecepatan tinggi.<sup>76</sup> Insiden ini juga mengakibatkan lebih dari 860 orang luka-luka, 350 orang adalah dari pihak militer.

Sementara itu, rekaman video menunjukkan bahwa tentara menunjukkan senapan mereka ke arah kerumunan pengunjung rasa, tapi masih belum jelas siapa yang menembak mereka. *Man in Black* lengkap dengan senjata dan berpakaian hitam terekam oleh beberapa jurnalis yang sedang meliput insiden tersebut. Video rekaman BBC menunjukkan bahwa pria bersenjata berpakaian hitam membawa senapan serbu dan berjalan diantara kerumunan kelompok Kaus Merah, sementara itu rekaman video yang lain menunjukkan bahwa sekelompok orang bersenjata sedang duduk dibalik benteng pertahanan Kaus Merah. Kameramen televisi

---

<sup>75</sup> Amsterdam & Peroff LLP, *Mark of the Beast: Branding Oppotition as "Terrorism" in Thailand*, Thailand 2011 General Election Report Series, No. 4, hlm. 1-3.

<sup>76</sup> Victims on Both Sides Hit by High Velocity Bullets, Doctors Say, *The Nation*, 27 April 2010.

*Reuters*, Hiro Muramoto yang tertembak dilokasi kejadian. Saat itu terekam peristiwa meledaknya granat yang mengejutkan Kaus Merah dan militer. *Men in Black* berusaha menyingkirkan para korban yang tubuhnya sudah berlumuran darah dari tempat terjadinya insiden tersebut. Dalam rekaman itu, Kaus Merah menyatakan bahwa *Men in black* adalah penyelamat. Namun, mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya.

Pemerintah menyatakan bahwa dalam insiden 10 April di Rachaprasong ada 'teroris' diantara para demonstran Kaus Merah. Hal ini yang membuat pemerintah bertindak lebih tegas dan menuduh kelompok Kaus Merah ingin menggulingkan monarki Thai. Hukum *Lèse Majesté* yang dimana menerapkan hukuman berat sampai dengan 15 tahun penjara, hal ini sering digunakan oleh Thailand guna menjatuhkan lawan dan meredakan perbedaan pendapat dalam politik. Militer yang mendominasi CRES, dimana lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi keamanan nasional di bawah keadaan darurat, merilis sebuah grafik yang menunjukkan suatu jaringan gerakan anti-monarki yang menghubungkan kepada berbagai individu terkait dengan kelompok Kaus Merah dan PTP, khususnya menitikberatkan kepada mantan PM yang populis, yakni Thaksin.

Insiden April Setelah insiden 10 April 2010 lalu, akhirnya kelompok Kaus Merah mulai menghentikan aksi protes mereka yang berada dekat dengan pusat pemerintahan. Namun, bukan berarti mereka berhenti berunjuk rasa, tapi perjuangan mereka berlanjut mendirikan sebuah perkemahan di Rachaprasong, tepatnya dipersimpangan jalan utama daerah pusat bisnis Bangkok. Mereka khawatir dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak militer secara mendadak karena telah mengganggu ketertiban umum, maka mereka menumpuk ban-ban bekas dan tiang-tiang bambu sebagai benteng perlindungan mereka dari serangan.

Pada tanggal 22 April 2010, ketegangan antara kelompok Kaus Merah dengan pihak militer semakin memanas. Terdapat lima granat yang menghantam daerah perkemahan atau tempat kelompok Kaus Merah berlindung. Insiden kali ini mengakibatkan seorang tewas dan 80 orang luka-luka. Pihak pemerintah menyatakan bahwa serangan granat itu dilempar dari sebelah perkemahan Kaus

Merah. Pemimpin Kaus Merah membantah bahwa pihaknya terlibat dengan serangan granat tersebut.

Pada tanggal 29 April 2010, salah satu penjaga Kaus Merah menyerang tentara yang bersembunyi di rumah sakit Chulalongkorn, yang berada di samping perkemahan mereka. Serangan itu dipimpin oleh sekutu mantan PM Thaksin, yakni Panket Phayap. Hal ini mengakibatkan aktivitas di rumah sakit lumpuh total dan para pasien di rumah sakit segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemimpin Kaus Merah meminta maaf atas kejadian penyerangan terhadap rumah sakit dan ia juga menyatakan bahwa tidak menyetujui serangan yang dilancarkan oleh Phayap tersebut.

Meningkatnya kekacauan, membuat PM Abhisit saat itu mengeluarkan pernyataan di televisi nasional dan ia menawarkan untuk mengadakan pemilihan umum pada tanggal 14 November 2010. Dalam pernyataannya, Abhisit juga menambahkan lima aspek menuju proses rekonsiliasi nasional, antara lain :

1. Menegakkan Monarki Thai.
2. Menyelesaikan ketidakadilan sosial-ekonomi.
3. Memastikan media tidak berpihak kemana pun.
4. Melakukan penyelidikan atas kekerasan yang telah terjadi.
5. Melakukan reformasi politik.

Para pemimpin kelompok Kaus Merah awalnya menyambut baik rencana yang ditawarkan oleh Abhisit. Namun, perbedaan internal ditubuh Kaus Merah, dimana faksi yang lain atau kelompok Kaus Merah garis keras tidak ingin mengakhiri protes tanpa hasil apapun. Pemerintah yakin jika Kaus Merah dapat mengakhiri protes dengan jalan damai. Hal ini ditandai dengan para pemimpin Kaus Merah moderat telah kehilangan kendali oleh Thaksin dan kelompok garis keras yang menolak kesepakatan damai. Pada tanggal 12 Mei 2010, Abhisit yang sudah bersikap lunak terhadap para pemimpin Kaus Merah moderat untuk melakukan negosiasi damai, akhirnya ia mencabut kembali penawarannya untuk diadakannya pemilu lebih awal.

Pemerintah berupaya melakukan tekanan untuk mengambil alih daerah pusat bisnis Bangkok yang dikuasai oleh kelompok Kaus Merah. Kemudian, insiden ini menewaskan Jenderal Khattiya Sawasdipol atau Seh Daeng, dimana ia yang telah membantu dalam menjaga keamanan di sekitar perkemahan kelompok Kaus Merah. Akhirnya, Seh Daeng tertembak di bagian kepala dan meinggal dunia setelah serangan dari militer. Terbunuhnya Seh Daeng membuat api perjuangan kelompok Kaus Merah semakin membara.

Operasi militer pada tanggal 14 – 19 Mei 2010 dengan upaya mengambil kembali daerah Rachaprasong dari kelompok Kaus Merah membuat posisi militer semakin kuat. Pada operasi itu, militer diperbolehkan melakukan tembakan peringatan ke udara untuk mempertahankan diri sendiri ketika mereka berhadapan dengan sekelompok orang yang bersenjata. Penembak jitu dikerahkan dalam operasi ini, mereka ditempatkan di atas gedung-gedung yang ada disekitar perkemahan kelompok Kaus Merah. Militer mengepung daerah perkemahan Kaus Merah dengan mendirikan sebuah benteng pertahanan dari tumpukan karung yang berisi pasir dan kawat berduri. Sementara itu, di pihak Kaus Merah juga membentengi pertahanan mereka dengan membangun suatu tumpukan dari ban-ban yang tidak terpakai lagi. Di sisi lain, mereka juga membakar beberapa ban untuk memperkeruh suasana di sekitar daerah operasi militer tersebut.

Pemerintah menyatakan bahwa pasukannya diperbolehkan menggunakan peluru karena ada teroris yang menyusup masuk diantara barisan kelompok Kaus Merah. Sementara itu, pihak yang peduli dengan HAM menyatakan bahwa ancaman militer atas penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi para demonstan tidak seimbang dengan kekuatan Kaus Merah sendiri yang berjuang dengan tangan kosong, atau dengan ketapel dan petasan buatan rumah. Peneliti dari *Crisis Goups* secara langsung menyaksikan suatu kejadian dimana militer menembakkan peluru ke arah kelompok pengunjung rasa yang tidak bersenjata, diantaranya perempuan dan anak-anak. Hal ini dilakukan militer karena dari pihak kelompok Kaus Merah awalnya melemparkan petasan buatan rumah yang tidak mematikan ke arah helikopter milik militer. Sementara itu, seorang peneliti wartawan asing juga melihat demonstran Kaus Merah yang menggunakan ketapel

saling serang dengan militer dengan menggunakan senjata.<sup>77</sup> Selama enam hari konfrontasi berlangsung, pemerintah merilis jumlah angka dan senjata yang ditemukan disekitar perkemahan Kaus Merah.

Dari insiden itu, setidaknya 54 orang tewas termasuk dua orang tentara, dan 470 orang luka-luka. Insiden ini merupakan yang paling mematikan yang terjadi selama bentrokan antara kelompok Kaus Merah dengan militer. Pada tanggal 19 Mei 2010 kelompok Kaus Merah menunjuk Candi Budha di Pathumwanaram sebagai daerah netral yang bebas dari senjata. Enam orang waga sipil tertembak mati, termasuk petugas medis dan dua orang perawat. Pemerintah mengatakan bahwa tidak memerintahkan pasukannya untuk mendekati Candi Budha tersebut. Akan tetapi, tentara yang beroperasi di daerah tersebut mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti orang-orang yang dicurigai sebagai teroris dan tidak menembak ke arah kerumunan massa. PM Abhisit saat itu mengatakan penyesalan atas terjadinya insiden tersebut. Insiden pada tanggal 19 Mei 2010 merusak 36 bangunan yang ada disekitar Bangkok, yang meliputi pusat perbelanjaan, *Central World Plaza*, Bursa Efek di Thailand, dan beberapa bank komersial. Kekerasan di Bangkok memicu kemarahan kelompok Kaus Merah di pedesaan. Hal ini ditandai dengan pembakaran kantor Gubernur di empat provinsi di Timur Laut Thailand.

Pada bulan Februari 2010, situasi semakin memburuk setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan untuk menyita asset Thaksin sebesar 46 miliar Bath (\$ 1.4 miliar).<sup>78</sup> Hal ini direspon oleh para pendukung Thaksin dengan menggelar demonstrasi menduduki Kota Bangkok. Pusat kota sering dijadikan tempat para pengunjung rasa menggelar aksinya karena jaraknya hanya dua kilomter dari pusat pemerintahan. Tujuan kelompok Kaus Merah adalah menuntut pembubaran parlemen. Mereka berparade mengelilingi kota Bangkok menggunakan truk, mobil bak terbuka, sepeda motor, dan ada yang berjalan kaki. Para pendukung

---

<sup>77</sup> "Nick Nostitz in the Killing Zone", Diperoleh dari, <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2012, pada pukul 20.00 WIB.

<sup>78</sup> Andre Vltchek, "In Bangkok Many Reds Look Beyond Thaksin Toward Revolution : A Photo Essay", dinduh dari : <http://www.japanfocus.org/-Andre-Vltchek/3350>, diakses pada tanggal 15 Maret 2012, pada pukul 23.00 WIB.



yang ada di trotoar sepanjang jalan menyabut aksi kelompok Kaus Merah, yakni dengan melambaikan bendera warna merah atau potongan kain merah.

### **3.4. Kejatuhan Rezim Abhisit Vejjajiva**

Tekanan dari kelompok Kaus Merah mengakibatkan situasi politik tidak stabil semasa pemerintahan Abhisit. Banyak korban yang telah berjatuhan selama bentrokan antara militer dengan para demonstran di Ratchaprasong. Dengan datangnya tekanan dari kelompok Kaus Merah mengakibatkan instabilitas politik semasa pemerintahan Abhisit. Pemerintahan Abhisit mendapatkan tekanan dari kelompok Kaus Merah yang menggelar berbagai aksi sepanjang tahun (2009-2010) yang mengakibatkan instabilitas politik. Memasuki awal tahun 2011, citra Abhisit semakin menurun ketika pemerintahannya dihadapkan dengan permasalahan pada sengketa Candi Preah Vihear yang terletak di perbatasan Thailand-Kamboja. Konflik antara kedua negara pecah didekat Candi Preah Vihear dan mengakibatkan 3 orang WN (Warga Negara) Thailand dan 8 orang WN Kamboja meninggal dunia akibat kontak senjata yang terjadi diperbatasan. Kejadian ini memaksa ribuan warga Thailand agar segera dievakuasi dari wilayah sekitar konflik.

Masyarakat Internasional khawatir terjadinya konflik tersebut, sehingga hal ini mendorong Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini untuk ikut campur tangan dalam penyelesaian konflik antara Kamboja dengan Thailand. Pada tanggal 14 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan di New York, dan menghadirkan Menteri Luar Negeri dari kedua negara yang konflik, serta Indonesia. Dewan Keamanan PBB memfasilitasi peran ASEAN untuk berunding dan meyerukan agar kedua belah pihak yang konflik untuk memberhentikan gencatan senjata. Setelah perundingan itu, akhirnya Indonesia menyatakan kesediaannya untuk mengirim pemantau ke daerah konflik guna meredakan konflik agar tidak berkepanjangan. Sementara itu, sidang yang mengadili kedua WN Thailand yang masih ditahan masih berjalan. Akhirnya, pengadilan menemukan Veera dan Ratee dinyatakan bersalah karena masuk ke

wilayah Kamboja secara ilegal. Mereka juga dituduh sebagai mata-mata (*spy*) atau spionase dan melanggar di daerah militer Kamboja. Veera dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun dan Ratre 6 (enam) tahun penjara. Mereka telah memutuskan untuk naik banding, dan mereka akan mencari pengampunan dari kerajaan.

Pemerintah Abhisit mendapat tekanan dari pendukungnya sendiri atau kelompok Kaus Kuning yang menggulingkan dua PM dari PPP. Pada tanggal 5 Februari, kelompok ini menyatakan bahwa PM Abhisit tidak layak memimpin Thailand, karena tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan wilayah Thailand dan menuduh pemerintahan Abhisit sangat korup. Pernyataan lainnya yang dilayangkan Kaus Kuning adalah menyerukan agar Abhisit mundur dari kursi PM dan membuka peluang untuk memilih PM baru yang lebih mampu dalam penyelesaian di perbatasan tersebut. Pemimpin Kaus Kuning Sondhi Limthongkul kemudian mengatakan kepada pendukungnya bahwa pemerintahan ini adalah lebih buruk daripada pemerintahan sebelumnya.

Tuntutan yang layangkan oleh Kaus Kuning dalam memaksa mundur Abhisit, sebenarnya hal itu dilakukan untuk mendesak militer untuk campur tangan dalam penyelesaian konflik di perbatasan. Kelompok Kaus Kuning menentang pemerintah untuk menggelar pemilu. Argumen ini didukung oleh Jenderal Therdsak Satjarak, mantan wakil komandan di Angkatan Udara, di depan para pengunjung rasa kelompok Kaus Kuning, Therdsak mengatakan bahwa “saat ini, hanya ada bandit dan kadal di parlemen. Jika tidak ada yang layak untuk memimpin negeri ini, sebaiknya tidak perlu adanya pemilihan. Saya percaya bahwa roh-roh suci akan melindungi negara kita dan pemilu tidak akan terjadi dalam waktu dekat”. Jika pemilu tetap berlangsung, maka Sondhi menyerukan kepada pendukungnya, yakni Kaus Kuning agar tidak memberikan suara mereka pada kotak pemilihan. Beberapa pengamat yang berpikir kritis menyampaikan bahwa kasus perbatasan ini Kaus Kuning kemungkinan untuk mempengaruhi militer dengan dalih memberikan ruang kepada militer untuk melakukan kudeta terhadap Abhisit. Tidak mungkin dikesampingkan peran militer dalam struktur

negara Thailand yang sudah ke-18 kali melakukan kudeta, sejak Thailand berubah dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional tahun 1932.

### 3.5. Implikasi Teoritis

Kejatuhan Abhisit merupakan hal yang diinginkan oleh kelompok Kaus Merah, karena terpilihnya Abhisit dianggap tidak demokratis tanpa melalui pemilu. Selama pemerintahan Abhisit, kelompok ini sering melakukan berbagai aksi menekan pemerintahan Abhisit. Dalam bab 1, telah dijelaskan mengenai teori kelompok penekan. Kelompok Kaus Merah termasuk dalam kategori kelompok anomi, dimana kelompok ini tidak mempunyai organisasi, akan tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai persamaan frustrasi dan ketidakpuasaan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, kelompok ini secara spontan menggelar aksi missal yang timbul akibat frustrasi dan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Ketidakpuasaan ini diungkapkan melalui demonstrasi di berbagai wilayah dalam menekan Abhisit agar mundur dari PM Thailand. Kekerasan yang terjadi selama pemerintahan Abhisit merupakan bentuk tekanan karena pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan yang dianggap diktator oleh kelompok pro-demokrasi ini.

Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan berfungsi sebagai pendidikan. Kelompok Kaus Merah sebagai kelompok penekan mendirikan sekolah politik yang bertujuan memberikan pendidikan politik bagi anggotanya agar memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam melakukan aksi protes. Kelompok penekan juga berkerja sesuai dengan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran politik. Hal ini menjadikan kelompok penekan merupakan agen yang sangat penting dari partisipasi politik. Dalam konteks Thailand, kelompok Kaus Merah berhasil menjatuhkan rezim Abhisit karena adanya partisipasi rakyat yang berusaha mempengaruhi dari luar pemerintahan dengan memobilisasi dukungan rakyat, seperti petisi, demonstrasi dan bentuk-bentuk protes lainnya.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Kelompok Kaus Merah sebagai kelompok penekan berperan dalam menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand. Kelompok loyalis ini memberikan tekanan politik semasa pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Kelompok ini melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan aksi pendudukan kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Tekanan yang dilayangkan oleh kelompok pro-Thaksin mengakibatkan instabilitas politik yang berkepanjangan semasa pemerintahan Abhisit. Instabilitas politik yang diakibatkan oleh kelompok Kaus Merah berpengaruh terhadap kejatuhan Abhisit. Berbagai aksi ini mengakibatkan turunnya popularitas Abhisit sebagai PM Thailand.

Kemunculan Kaus Merah disebabkan oleh terpilihnya Abhisit Vejjajiva sebagai PM Thailand, karena naiknya Abhisit tanpa melalui proses pemilu. Terpilihnya Abhisit Vejjajiva mendapat dukungan dari beberapa partai politik di parlemen pasca dibubarkannya PPP oleh CCT. Abhisit mendapat dukungan dari CTP (*Chart Thai Party / The Nation Party*), RJT (*Ruam Jai Thai Party / Thais United National Development Party*), BJT (*Bhum Jai Thai Party*), PP (*Puea Pandin / The Motherland Party*), dan MTP (*Matchima Thipataya Party / Neutral Democratic Party*). Abhisit bersama partainya DP berhasil menggalang kekuatan di parlemen dan mendapat restu dari Raja untuk memerintah Thailand. Kenaikan Abhisit sebagai PM Thailand mendapat tekanan dari kelompok Kaus Merah yang menuntut agar Abhisit mengundurkan diri dan membubarkan parlemen, serta menggelar pemilu dalam waktu singkat.

Kelompok Kaus Merah melakukan tekanan diawal pemerintahan Abhisit Vejjajiva pada tahun 2009. Massa yang terkoordinasi berhasil menduduki Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya. Massa yang terkoordinasi melakukan aksi protes menduduki Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya tempat diselenggarakannya ASEAN-Summits di Pattaya. Mereka berhasil menggagalkan pertemuan para pemimpin negara-negara di ASEAN ditambah dengan pemimpin

Asia Timur dan Australia. Mereka tidak hanya menduduki hotel di Pattaya melainkan mereka juga menggelar demonstrasi di Bangkok. Kerusuhan yang terjadi di Pattaya dan Bangkok membuat pemerintah mengambil tindakan tegas dalam menghadapi massa. Pemerintah memberlakukan status darurat dinegaranya dan menerjunkan pasukan keamanan untuk menghadapi dan mencegah massa kelompok Kaus Merah agar tidak meluas ke daerah lain.

Pemimpin kelompok Kaus Merah berpendapat bahwa gerakan April 2009 dianggap gagal dalam meruntuhkan rezim Abhisit. Mereka kembali ke markas di pedesaan dan merencanakan strategi baru dalam persiapan aksi demonstrasi besar-besaran pada tahun 2010. Para pemimpin Kaus Merah mengadopsi strategi mobilisasi massa dengan mendirikan sekolah politik di pedesaan. Sekolah politik yang didirikan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada anggota Kaus Merah mengenai demokrasi, gerakan sosial, dan kerja tim yang baik, agar gerakan mereka mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Kehadiran sekolah politik ini berpengaruh terhadap pengrekrutan massa dalam jumlah yang besar. Selain itu, massa yang tidak memiliki kesempatan bergabung ke sekolah politik, mereka mendapatkan pengetahuan tentang demokrasi melalui radio komunitas, televisi, surat kabar, dan internet.

Massa yang terkoordinasi kembali muncul ke arena pentas politik Thailand setelah MA mengeluarkan putusan tentang penyitaan harta Thaksin pada 26 Februari 2010. Banyak pengamat berpendapat bahwa vonis terhadap harta Thaksin sama saja memberikan peluang terhadap massa pendukungnya yang tergabung dalam kelompok Kaus Merah untuk menggelar aksi protes. Ribuan massa menggelar aksi mengelilingi kota Bangkok menuntut agar Abhisit turun dari jabatannya. Mereka juga menuntut Abhisit segera membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu singkat.

Massa yang menggunakan atribut bewarna merah memusatkan aksi protes di kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Mereka berhasil menduduki kawasan komersial tersebut dan melumpuhkan perekonomian Thailand selama dua bulan (Maret-Mei 2010). Pemerintah berupaya menawarkan jalan negosiasi damai kepada kelompok Kaus Merah untuk mengakhiri konflik agar tidak ada lagi

korban berjatuh. Tawaran tersebut disambut baik oleh pemimpin Kaus Merah moderat. Namun, hal ini mendapat kritikan dari kelompok Kaus Merah garis keras atau Kaus Merah Siam. Perpecahan di tubuh kelompok Kaus Merah membuat kebingungan dari sebuah gerakan. Tidak adanya garis komando yang jelas dari pemimpin Kaus Merah dapat mengakibatkan dengan mudahnya aktor lain dapat merusak suatu efektifitas dalam sebuah gerakan. Perpecahan yang terjadi tidak menyurutkan semangat para anggota dan simpatisan yang telah tergabung dalam kelompok 'Kaus Merah' dalam memperjuangkan terciptanya demokrasi sejati di Thailand.

Kelompok Kaus Merah sebagai kelompok penekan berperan dalam menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand. Kelompok penekan menurut Stuart Gerry Brown, dan Edmund Burke sebagai agen yang sangat penting dalam partisipasi politik. Kelompok ini berupaya mempengaruhi dukungan rakyat, khususnya di wilayah Utara dan Timur Laut Thailand dalam melakukan aksi demonstrasi, petisi, dan memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya, serta melakukan aksi pendudukan objek-objek vital yang mengakibatkan instabilitas politik dan kejatuhan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Budiardjo, Miriam Prof. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bambang S. & Sugianto. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Grahadi, 2007.
- Charoensin-o-larn, Chairat. *Southeast Asian Affair 2010, Thailand in 2009: Unusual Politics Become Usual*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Kriyanto Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Madu, Ludiro. *Keajaiban Thailand: Analisis Deskriptif tentang Asal-usul dan Pemulihan Krisis Ekonomi*. Surabaya: JP-Press, 2003.
- Manan Munafrizal. *Gerakan Rakyat Melawan Elite*. Yogyakarta: Resist Book, 2005.
- Nawari, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- Nawari, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Neuman, W. Laurens. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Bacon, 1997.
- Perroff, LLP & Robert Amsterdam, *Mark of the Beast Branding Oppotition as "Terrorism" in Thailand*. 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan IX, 1995.
- Ungpakorn, Giles Ji. *A Coup for the Rich: Thailand's Political Crisis*. Thailand: National Library of Thailand Cataloging, 2007.

Ungpakorn, Giles Ji. *Thailand's Crisis and the Fight for Democracy*. U.K: WDPress, 2010.

Usman, Dr. Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Watch, Human Right. *World Report 2010 Event of 2009*. US: Human Right Watch, 2010.

### **Jurnal dan Penulisan Ilmiah**

Ji Ungpakorn, Giles. *Class Struggle between the Colored T-Shirt in Thailand*, Journal of Asia Pacific Studies Vol. 1 No. 1.

Rado, Istvan. *Thaksinomics in Light of the Heterodox View Economic Development*. Journal Contemporary Eastern Asia Vol 7 No. 1.

Thabchumpon, Naruemon & Duncan McCargo. *Urbanized in the 2010 Thai Red Shirt: Not Just Poor Farmers?*, Asian Survey Vol. 51 No. 6.

International Crisis Group. *Bridging Thailand's Deep Divide*, Crisis Group Asia Report No. 192.

Issundari, Sri. *Latar Belakang Kudeta Militer Thailand pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra*, LIPI Vol. 12 No. 4, Desember 2008.

Phongpaichit, Pasuk & Chris Backer, *The Mask-play Election: General, Politicians, and Voters at Thailand's 2007 Pool*, ARI (Asia Research Institute), Working Paper Series No. 144.

International Crisis Group, *Bridging Thailand's Deep Divide*, Crisis Group Asia Report No. 192.

Amsterdam & Peroff LLP, *The Bangkok Massacres: A Call for Accountability*, White Paper.

Amsterdam & Peroff LLP, *Mark of the Beast: Branding Oppotition as "Terrorism" in Thailand*, Thailand 2011 General Election Report Series, No. 4.



### Skripsi

Martalina H. *Strategi Politik Thaksin Shinawatra dan Partai TRT dalam Memenangkan Pemilihan Umum di Thailand*. Skripsi Sarjana, Depok: FISIP UI, 2001.

Putri, Haviva Mahani. *Integrasi Masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan: Studi Kasus SBPA dan CPM43*". Skripsi Sarjana, Depok: FISIP UI, 2008.

### Koran

*Media Indonesia*, Selasa 30 September 2008.

### Tesis

Daria Redanskikh, *Legitimacy Crisis and Thailand's Road to National Reconciliation*, Master's Thesis, awarded by the Philosophical Faculty of Albert-Ludwigs- Universität Freiburg (Germany) and the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO- Buenos Aires (Argentina), Wintersmester 2010/2011, Social Sciences.

### Internet

<http://query.nytimes.com>

<http://www.nationmultimedia.com>

<http://www.bangkokpost.com>

<http://www.atimes.com>

<http://www.state.gov>

<http://www.koran-jakarta.com>

<http://www.asia-pacific-action.org>

<http://news.bbc.co.uk>

<http://www.abhisit.org>

<http://english.pravda.ru>

<http://www.time.com>

<http://www.asiaone.com>  
<http://relooney.fatcow.com>  
<http://www.crisisgroup.org>  
<http://www.zenjournalist.com>  
<http://asiapacific.anu.edu>  
<http://www.prachatai.com/english>  
<http://www.constitutionalcourt.or.th/english>  
<http://www.guardian.co.uk>  
<http://www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre>  
<http://journal.vpweb.com>  
<http://www.thaiaccountability.org>  
<http://isjd.pdii.lipi.go.id>  
<http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional>  
<http://www.ucdp.uu.se>  
<http://www.republika.co.id>  
<http://www.senate.go.th>  
<http://www.japanfocus.org>

LAMPIRAN 1  
LOGO KELOMPOK KAUS MERAH



## LAMPIRAN 2

### Daftar Korban Tewas antara Demonstran dengan Militer bulan Maret – Mei 2010

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
1	Kamonked Akhard	25 Perawat	1 Mei 2010	Tertembak di Kuil Wat Pratum.
2	Fabio Polenghi	45 Italian Photographer	19 Mei 2010	Tertembak di dekat Lumpini Park.
3	Phloen Wongma	40 Sipil	19 Mei 2010	Tertembak saat kelompok 'Kaus Merah' menggelar demonstrasi di Udon Thani.
4	Priv. Phuriwat Praphan	26 Militer	10 April 2010	Tewas dalam ledakan bom.
5	Colonel. Romklao Thuwatham	Militer	19 Mei 2010	Tewas dalam bentrokan.
6	Mana Saenprasoetsi	25 Petugas Medis	19 Mei 2010	Tertembak di dekat daerah Bonkai.
7	Channarong Phloisila	45 Supir Taksi	15 Mei 2010	Tertembak di pom bensin Shell dekat Ratchaprarop.
8	Amphon Satiyarat	26 'Kaus Merah' / Mahasiswa Hukum		Tertembak di kepala saat demonstrasi. Ayahnya, Mr. Suradit Thatiyarat menulis surat kepada anaknya: "Ketika kami melihat Anda tewas, jiwa kami seolah-olah tercabik-cabik. Saya tidak percaya dengan semua ini, karena negara ini adalah negara Buddha dan saya menyadari negara kita tidak diperintah oleh sistem demokrasi melainkan dikendalikan oleh kejahatan dari neraka. Saya mengutuk Abhisit, Suthep, dan mereka yang terlibat dalam pembunuhan anak saya agar kelak

					mendapatkan karma yang buruk, dan tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka lagi”.
9	Phaisan Thiplom	38	‘Kaus Merah’		Tertembak di kepala saat demonstrasi. Istri dan anak-anaknya menulis pesan singkat : “saya berdoa agar Anda istirahat dengan tenang dan jangan khawatir tentang kami. Kami sangat merindukanmu”.
10	Thipanet Jiampol (“Piak”)	32	‘Kaus Merah’		Tertembak di perut dan lengan, di jalan Ratvithee.
11	Prachuap Silaphan		‘Kaus Merah’	14 Mei 2010	Tertembak di Lumpini Park.
12	Akharadet Khankaeo (“Tualek”)	23	‘Kaus Merah’ / Petugas Medis		Tertembak di Kuil Wat Pratum
13	Yuean Phothongkham	60	‘Kaus Merah’	21 Mei 2010	Tertembak dan terluka saat bentrokan, dan meninggal di rumah sakit.
14	Priv. Anuphong Mueangraphan	21	Militer	10 April 2010	Tewas karena ledakan granat.
15	Priv. Singha Onsong		Militer	10 April 2010	Tertembak di dada dan kaki.
16	Priv. Anuphong Hommali	22	Militer	10 April 2010	Tewas karena ledakan bom.
17	Priv. Narongrit Sala		Militer		Tidak sengaja tertembak oleh pasukan keamanan
18	Sgt. Phongchalit Thipayanontakan	31	Militer	17 Mei 2010	Tertembak di kepala saat sedang berpakaian preman.

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
19	Maj. Gen. Khattiya Sawasdipol (“Seh Daeng”)	Militer	17 Mei 2010	Tertembak di kepala saat diwawancara oleh <i>New York Times</i> di daerah Salndeang. Ia meninggal di rumah sakit tanggal 17 Mei 2010.
20	Sgt. Anusit Chansaento	Militer	20 Mei 2010	Tewas karena ledakan granat M79 di pos pemeriksaan militer dekat Lumini Park.
21	Mongkhon Khemthong	37 Petugas Medis	19 Mei 2010	Tertembak ketika sedang menyelamatkan korban yang terluka saat bentrokan di Kuil Wat Pratum. Ayahnya menyatakan kesedihan, karena ia meninggal mendahului sanak keluarga lainnya.
22	Hiroyuki Muramoto	Jurnalis Jepang di Reuters	10 April 2010	Tertembak di dada.
23	Aung Lwin / Muhammad Ali	Orang Asing (Burma)		Tertembak saat bentrokan.
24	Pol. Sgt.Maj. Wittaya Phromsamli	Polisi	8 Mei 2010	Tewas karena ledakan granat M79 saat bertugas di Silom.
25	Mana Acharan	Satpam kebun binatang	10 April 2010	Tertembak di kepala.
26	Manoon Thalad	44 Bukan anggota Kaus Merah		Tertembak di kepala dekat daerah Ratchapratop.
27	Boonting Pangсила	25 Petugas Medis	14 Mei 2010	Tertembak saat sedang bertugas di Ratchaprarop.
28	Chanthana Saspsi (“Kai”)	Bukan Anggota Kaus Merah		

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
29	Inplaeng Thetwong	33 Bukan Anggota Kaus Merah	14 Mei 2010	Tertembak di daerah Bonkai.
30	Pria Thailand (tidak teridentifikasi)	Bukan Anggota Kaus Merah		
31	Somsak Kaewsan	34 Warga sipil	10 April 2010	Tertembak saat bentrokan.
32	Sawat Wong-Ngam	28 Warga Sipil		Tertembak di kepala saat demonstrasi, istrinya saat itu sedang hamil 6 bulan. Istrinya sedih karena ia tidak bisa melihat anak perempuannya lahir.
33	Thawatthanachai Klatsuk	36 Warga Sipil	10 April 2010	Tertembak di dada. Ia meninggalkan putri berusia 7 tahun. Kakaknya menulis surat : “Saya ingin Anda istirahat dengan tenang, jangan khawatir karena Ibu saya yang akan merawatnya. Anda menyelesaikan tugas Anda sebagai warga negara Thailand yang mencintai negeri ini dan telah mengorbankan nyawa Anda untuk mewujudkan demokrasi di Thailand. Anda adalah pahlawan Thailand dan saya tidak menyesali dengan apa yang telah Anda lakukan, adik saya”.

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
34	Kriangkai Khanoi	23 Warga Sipil		Tertembak di perut saat bentrokan. Saudara perempuannya, Ms. Thanyakamon menulis sebuah puisi untuknya : “ Untuk Kriangkrai Khanoi, serang pemuda berasal dari Roi-Ed memiliki hati seperti berlian. Dia berani melawan tentara dengan tangan kosong. Saya sangat terkesan dengan Anda dan berdoa agar Anda istirahat dengan tenang, dengan bendera Thailand yang menyelimuti tubuh Anda. Nama Anda, Kriangkrai Khanoi, tidak akan terlupakan”.
35	Nopphon Phaophanat	30 Warga Sipil	10 April 2010	Tertembak saat bentrokan.
36	Wasan Phutong	39 Warga Sipil		Tertembak di kepala. Dia meninggalkan dua putra (17 dan 15 tahun). Putranya menulis surat kepada ayahnya yang telah meninggal : “Saya sangat sedih atas kepergian ayah, militer yang menggunakan senjata dan tank berhadapan dengan warga sipil yang tidak bersenjata. Meskipun kesedihan menyelimuti kami, kematian ayah tidak sia-sia. Saya akan meneruskan perjuangan dan harapan ayah bahwa suatu hari nanti Thailand akan menjadi negara yang demokratis.
37	Saneh Ninlueang	48 Warga Sipil	14 Mei 2010	Tertembak.



No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan	
38	Pria Thailand (tidak teridentifikasi)				
	Piyaphong Kitiwong	32	Warga Sipil	14 Mei 2010	Tertembak saat berdiri di barisan depan menjaga 'Kaus Merah', pada tanggal 14 Mei 2010. Ayahnya, Mr. Poon tidak tahu bahwa anaknya menjadi penjaga kelompok 'Kaus Merah' sampai ia meninggal. Ketika diberitahu bahwa anaknya meninggal ia sangat terkejut sekaligus bangga karena anaknya mampu berpikir dan mandiri.
39	Somsak Silarak	28	Warga Sipil	14 Mei 2010	Tertembak di daerah Sala Daeng.
40	Chaiyan Wannachak	20	Warga Sipil	14 Mei 2010	Tertembak saat bentrokan.
41	Phan Khamkong		Warga Sipil		
42	Pria Thailand (tidak teridentifikasi)				
43	Kittiphan Khantong	26	Warga Sipil	14 Mei 2010	Tertembak di daerah segitiga Daeng Din.
44	Sonkrai Simueangpun		Warga Sipil		
45	Thanwa Wongsiri		Warga Sipil		
46	Suphachip Chulathat	39	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak di bagian kepala, di daerah Ratchaprarop.
47	Amphon Chuensi	25	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak saat bentrokan.
48	Samaphap Sithep	17	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak di bagian kepala, di daerah Soi Rangnum.
49	Uthai On-in	35	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak
50	Warin Wongsanit	25	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak di daerah Bon Kai

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan	
51	Phonsawan Nakachai	23	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak saat demonstrasi di daerah Bon Kai. Kakaknya, Mr. Nuengridee Nakachai mengatakan "Saya sangat sedih karena tidak pernah berharap kehilangan adikku begitu cepat. Saat itu, rasanya seperti mimpi ia baru saja kembali dari Bangkok dan pulang ke rumah untuk merayakan Songkran (tahun baru Thailand). Ibu pingsan ketika mengetahui ia ditembak dan kesempatan untuk hidup 50/50. Ibu pingsan kedua kalinya ketika diberitahu bahwa adik saya dinyatakan telah meninggal. Adik saya orang baik dan ia juga sangat peduli dengan keluarga, bahkan ia mengirimkan uang 2.000 Bath setiap bulan untuk membangun rumah kami".
52	Kriangkrai Luenthaisong	25	Warga Sipil	15 Mei 2010	Tertembak di bagian kepala, di Lumpini Park.
53	Somchai Phrasuwan	43	Warga Sipil	16 Mei 2010	Tertembak di bagian kepala.
54	Kiattikhun Chatwirasakun	25	Warga Sipil	16 Mei 2010	Tertembak di bagian dada.
55	Prachuap Prachuapsuk	42	Warga Sipil	16 Mei 2010	Tertembak.
56	Wongsakon Plaengsi	40	Warga Sipil	16 Mei 2010	Tertembak dan ia meninggal di rumah sakit.
57	Suphan Thomthong	49	Warga Sipil	16 Mei 2010	Tertembak di bagian perut dan ia meninggal pada hari yang sama di rumah sakit.
58	Chalio Diruenram	27	Warga Sipil	17 Mei 2010	Tertembak di bagian dada.
59	Suphot Yathima	37	Warga Sipil	16 Mei 2010	Tertembak di daerah Lung Suan.
60	Somphan Luangchom	35	Warga Sipil	17 Mei 2010	Tertembak di bagian perut.
61	Thawin Khammun	38	Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak di bagian kepala.

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
62	Wanita Thailand (tidak teridentifikasi)	Warga Sipil		
63	Pria Thailand (tidak teridentifikasi)	Warga Sipil		
64	Thanachot Chumyen	34 Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak.
65	Pratya Saekhwo	21 Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak
66	Wichai Manphae	61 Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak di daerah Kuil Wat Pratum.
67	Atthachai Chumchn	28 Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak di daerah Kuil Wat Pratum.
68	Pria Thailand (tidak teridentifikasi)			
69	Wasini Theppan	Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak di bagian dada dan perut, di persimpangan Phahonyothin.
70	Charun Chiamaeen	46 Supir Taksi		Tertembak di bagian dada, di depan sekolah Satri Wittaya. Istrinya, Ms. Nuan Chaimaen yang bekerja sebagai penjual makanan mengatakan bahwa suaminya bergabung demonstran lainnya berharap hidupnya akan lebih baik, jika rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya. Ms. Nuan juga menambahkan bahwa ia meminta pertanggungjawaban PM. Abhisit yang membunuh warga sipil yang tidak bersenjata, dimana mereka menginginkan demokrasi di negaranya.

No	Nama / Usia		Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
71	Thoetsak Funklinchan 29				Tertembak di bagian dada. Ayahnya, Mr. Banjerd Funklinchan menulis surat kepada Thoetsak : “Kepergian anak untuk selamanya merupakan hal yang paling menyedihkan bagi setiap keluarga, tidak ada yang menggantikan Anda. Kami keluarga “Funklingchan” mengutuk tindakan anarkis dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah. Tragedi ini seharusnya tidak terjadi di negeri Buddha. Saya berharap, dalam kehidupan berikutnya atau kehidupan apapun akan lahir seperti anak saya lagi. Istirahat dengan tenang anakku, yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dengan hati yang merah”.
72	Khanueng Chatthe 50		Warga Sipil		Tertembak di Monumen Demokrasi. Dia meninggalkan seorang istri dan anak berusia 14 tahun. Istrinya, Ms. Rabiab Chatthem menulis surat kepada suaminya yang tewas tertembak, “Saya sangat menyesal terjadinya tragedi ini, kepada semua keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Saya kehilangan suami dan ia adalah pemimpin dan tulang punggung di keluarga kami. Kami dan orang-orang yang masih bertahan akan berjuang untuk demokrasi. Istirahat dengan tenang semua pahlawan yang pemberani”.

No	Nama / Usia		Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
73	Narin Sichomphu		Warga Sipil	19 Mei 2010	
74	Buntham Thongphui	46	Warga Sipil		<p>Tertembak saat demonstrasi dengan kelompok 'Kaus Merah'. Dia meninggalkan seorang istri, dan dua orang anak (17 dan 8 tahun). Istri dan anak-anaknya menulis surat, " Suami dan ayah kami tercinta, tanpa kehadiranmu membawa kesedihan bagi kami, tapi itu sudah keputusanmu bergabung dengan para demonstran dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Anda telah melakukan yang terbaik dan orang-orang memandang Anda sebagai Pahlawan. Kami tahu bahwa Anda akan bangga, jika Anda bisa. Anda akan memberitahu kita tidak boleh bersedih, karena Anda melakukannya atas nama negara. Kami ingin Anda istirahat dengan tenang dan jangan khawatir tentang apapun yang terjadi kepada kami, karena kami tidak akan menyerah sebelum terwujudnya demokrasi sejati. Suami dan ayah tercinta, jika ada kehidupan selanjutnya, kami berharap akan hidup bersama lagi".</p>

No	Nama / Usia	Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
75	Anan Sirikunwanit	54	Warga Sipil		<p>Tertembak di bagian leher dan meninggal 1 bulan 4 hari kemudian. Dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan 16 tahun. Istrinya, Ms. Kornthong Sirikunwanit sangat sedih ketika diwawancara oleh salah satu sura kabar, Matichon. “Saya terkejut ketika pihak rumah sakit mengabarkan bahwa suami saya tertembak di bagian leher dan terluka parah. Para demonstiran termasuk suaminya menuntut demokrasi bukan untuk ditembaki. Saya tidak akan pernah berpikir hal ini akan terjadi pada 19 Mei 2010. Para demonstiran pro-demokrasi dan tidak bersenjata, dan mereka bukan teroris”.</p> <p>memberikan pernyataan di surat kabar Matichon, “</p>
76	Yutthana Thongcharoenphonporn	23	Warga Sipil / Mahasiswa		<p>Yuttana Thongcharoenphonporn, mahasiswa teknik di Universitas Teknologi Mahanakorn, ia tertembak di bagian kepala, di depan sekolah Wittaya Satri setelah bergabung dengan demonstiran kelompok ‘Kaus Merah’.</p>

No	Nama / Usia		Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
77	Saming Taengphet	49	Warga Sipil		Tertembak saat bentrokan. Dia meninggalkan tiga orang anak perempuan. Anak-anaknya menulis surat kepada ayahnya : “Malam itu, kami kehilangan ayah tercinta untuk selamanya. Sulit untuk menjelaskan bagaimana rasa kesedihan yang kami hadapi, tetapi kami bangga kepada Ayah karena telah mengorbankan hidupnya demi demokrasi dan dia juga akan bangga”.
78	Thotsachai Mekngamfa	43	Warga Sipil		Tertembak di bagian dada, di depan sekolah Wittaya Satri. Kakaknya menulis surat : Saya merasa hancur telah kehilangan adik saya, karena tindakan brutal yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Saya selalu berdoa agar Anda tenang di Surga”.
79	Monchai Saechong	54	Warga Sipil		Meninggal karena ledakan gas air mata. Istrinya, Jareon Chaiklang, menulis surat : “Saya tidak pernah memikirkan suami saya sebagai penghianat, dia pahlawan bagi negara karena ia menentang standar ganda dan menyerukan keadilan sosial. Saya berdoa atas kehilangan suami saya menandakan bahwa ini akan membawa keadilan karena ia tidak mati sia-sia. Pemerintah harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan dengan membubarkan parlemen dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”.

No	Nama / Usia	Status	Waktu Peristiwa	Keterangan
80	Watthananukun Siam 52	Warga Sipil		Tertembak di bagian dada, di depan sekolah Wittaya Satri saat demonstrasi. Istrinya, Chulalai Noppakon, menulis surat : “Suami yang tercinta, istirahatlah dalam kedamaian dan saya berdoa agar Anda tenang di surga. Jangan khawatir dengan apa yang terjadi. Meskipun saya sangat sedih, saya bangga dengan apa yang Anda lakukan demi negara karena apa yang Anda lakukan datang dari hati, bukan karena uang. Saya dan teman-teman berjanji akan meneruskan perjuangan Anda”.
81	Apichard Rachiwa 36	Warga Sipil	19 Mei 2010	Tertembak di bagian punggung. Dia tewas pada 9 Juni 2010. Ia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak.

Sumber : <http://www.thaiaccountability.org/the-dead/?lang>